

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN
HIDUP TERHADAP PABRIK SAGU DALAM PENGELOLAAN LIMBAH
DI KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN**

MERANTI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Sufriyandi

NPM : 157110005

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU**

2020

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

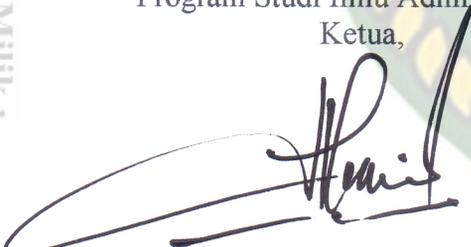
Nama : Sufriyandi
NPM : 157110005
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi syarat ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui.

Pekanbaru, 16 April 2020

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Ketua,

Pembimbing I


Hendry Andry, S.Sos., M.Si


Prof. Dr. H. Sufian Hamim, SH., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Sufriyandi
NPM : 157110005
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan- ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 16 April 2020

Ketua

Sekretaris



Prof. Dr. H. Sufian Hamim, SH., M.Si



Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si

Anggota



Eko Handrian, S.Sos., M.AP

Mengetahui
Wakil Dekan I



Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

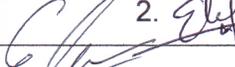
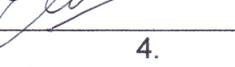
=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 113 /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 01 April 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 02 April 2020 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Sufriyandi
NPM : 157110005
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkukangan Hidup terhadap Pabrik Sagu dalam Pengelolaan Limbah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.**

Nilai Ujian : Angka : " 75 " ; Huruf : " B "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Sufian, M.Si.	Ketua	1. 
2.	Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Eko Handrian, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Andry Kurniawan, BPM., M.Si.	Notulen	4.

Pekanbaru, 02 April 2020
An. Dekan,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si.
Wakil Dekan I Bid Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 113/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Sufriyandi**
N P M : 157110005
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

1. Prof. Sufian.,M.Si Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Ema Fitri Lubis.,S.Sos.,M.Si Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Eko Handrian.,S.Sos.,M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
 4. Andry Kurniawan.,BPM.,M.Si Sebagai Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 01 April 2020
An. Dekan,

DR.H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi AP
4. A r s i p -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

N a m a : Sufriyandi
NPM : 157110005
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat di sahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 16 April 2020

Ketua

Sekretaris



Prof. Dr. H. Sufian Hamim, SH., M.Si



Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si

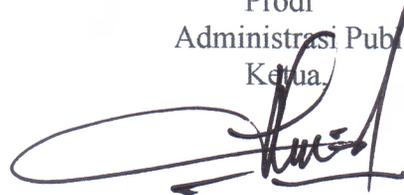
Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I

Prodi
Administrasi Publik
Ketua



Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si



Hendry Andry, S.Sos., M.Si

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Skripsi ini dapat penulis selesaikan yang berjudul : **“Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti”**.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salut dan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Prof.Dr.H.Syafrinaldi,SH.,M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan kesempatan pada

penulis dalam menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

3. Bapak Hendry Andry, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Progam Studi Ilmu Administrasi Publik dan seluruh dosen jurusan Ilmu Administrasi yang telah memfasilitasi dan memberi ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penulisan Skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Sufian Hamim, H., M.Si. selaku pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan memberikan arahan, bimbingan dan masukan kepada penulis terutama pada proses bimbingan berlangsung sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini terhadap apa yang telah diarahkan.
5. Kepada Kedua Orang Tua, ayahanda Darwis, ibunda Syarifah. Saya ucapkan terimakasih, karena telah memberi semangat dan dukungan baik secara moril dan materil kepada saya untuk menyelesaikan studi dengan tepat waktu.
6. Seluruh Staf, Karyawan/ti Tata Usaha Fisipol Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan Administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian Proposal ini.
7. Kepada teman-teman seperjuangan dalam menimba ilmu untuk merajut masa depan, terutama untuk, Tengku jeffrawira, Zikri Abdillah,

Nuraini, Muhammad Nurislami, Firdaus, Mirza Dwiki, Raja Ananda, Mawardi, Rezki mulana, Icam, Walpajri ilhami putra, Yunita Sari, Yulisa Indra Hartati, Yorenda Apri Armenita, Wiridona Rizki, Yola Afia Masdar, Thesa Eciolika, Tyo Ardiansyah, Tommy Pamungkas, Sandy Baskara, Wahyudi Oka, Ranggi dellon, Romy, Teguh, dan teman-teman seperjuangan Jurusan Administrasi Publik angkatan 2015, terutama kelas AP D.

8. Dan kepada seluruh yang terlibat baik dalam mendukung maupun memberi sarannya kepada penulis yang tidak dapat penulis cantumkan satu persatu.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik Beliau semua dibalas dengan Rahmat dan Karunia yang setimpal, Aamiin

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa, dan dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran bagi para pembaca.

Pekanbaru, Februari 2020

Penulis

Sufriyandi

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	12
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	13
2.1 Studi Kepustakaan.....	13
2.1.1 Konsep dan Teori Administrasi Publik.....	13
2.1.2 Konsep dan Teori Organisasi Publik.....	16
2.1.3 Konsep dan Teori Manajemen Publik.....	20
2.1.4 Konsep dan Teori Manajemen Sumber Daya Manusia.....	24
2.1.5 Konsep dan Teori Pengawasan.....	27
2.2 Kerangka Pikir.....	33
2.3 Hipotesis.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Desain Penelitian.....	35
3.2 Lokasi Penelitian.....	35
3.3 Konsep Operasional dan Operasionalisasi Variabel.....	36
3.3.1 Konsep Operasional.....	36

3.3.2 Operasionalisasi variabel.....	38
3.4 Teknik Penarikan Sampel.....	40
3.5 Jenis dan Sumber Data	42
3.6 Teknik Pengumpulan Data	42
3.7 Teknik Analisis Data	43
3.7.1 Teknik Analisi Data.....	43
3.7.2 Teknik Pengukuran Variabel.....	44
3.8 Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian	46
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	47
4.1 Gambar Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.....	47
4.1.1 Letak dan Kondisi Geografis.....	47
4.1.2 Luas dan Batas Wilayah Administrasi	48
4.1.3 Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Meranti	50
4.2 Sejarah Dinas Lingkungan Hidup.....	51
4.2.1 Visi dan Misi DLH Kabupaten Kepulauan Meranti.....	51
4.3 Struktur Organisasi	52
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
5.1 Identitas Responden dan Informan	57
5.1.1 Jenis Kelamin	58
5.1.2 Umur Responden.....	60
5.1.3 Pendidikan Responden	62
5.2 Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.....	65
5.2.1 Menetapkan Standar	66
5.2.2 Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	74
5.2.3 Pelaporan	80
5.2.4 Mengambil Tindakan Perbaikan.....	86
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	99
6.1 Kesimpulan.....	99
6.2 Saran	100

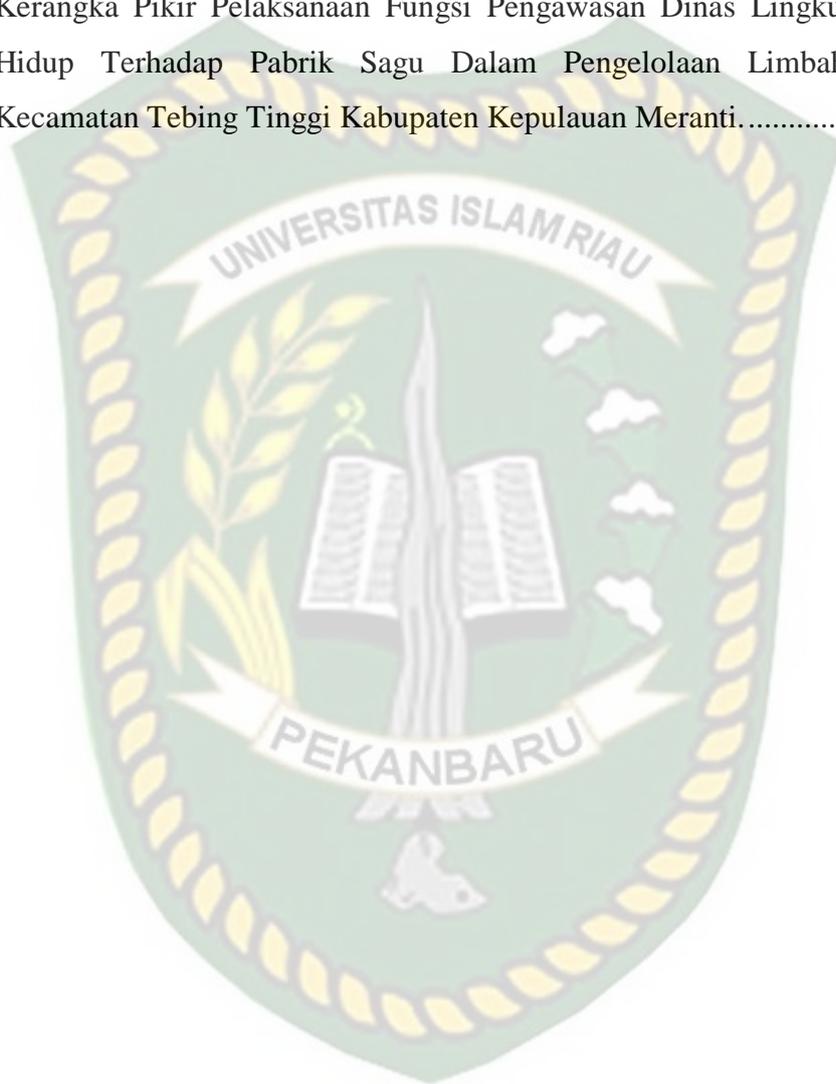
DAFTAR KEPUSTAKAAN	102
Buku-Buku	102
Sumber Lain	103
LAMPIRAN	104



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pikir Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.....	33



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 : Daftar Keseluruhan Pabrik Sagu dan Daftar Izin Usaha UKL/UPL Yang Ada di Kabupaten Kepulauan Meranti	5
1.2 : Daftar Nama Kilang/Perusahaan Sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan meranti	6
3.1 : Konsep Operasional Variabel Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.....	38
3.2 : Tabel Populasi dan Sampel (Responden dan Informan) Penelitian Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.....	41
3.3 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti	46
5.1 : Identitas Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti	58
5.2 : Identitas Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Karyawan Pabrik Sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.....	59
5.3 : Identitas Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Masyarakat Yang Tinggal di Sekitar Pabrik Sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.....	59
5.2 : Identitas Responden Berdasarkan Latar belakang Usia/Umur Pada Pegawai Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.....	60

5.3 : Identitas Responden Berdasarkan Latar belakang Usia/Umur Pada Karyawan Pabrik Sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.....	61
5.4 : Identitas Responden Berdasarkan Latar belakang Usia/Umur Pada Masyarakat Yang Tinggal di Sekitar Pabrik Sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.....	62
5.3 : Identitas Responden Berdasarkan Latar belakang Tingkat Pendidikan Pada Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.....	63
5.4 : Identitas Responden Berdasarkan Latar belakang Tingkat Pendidikan Pada Karyawan Pabrik Sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.....	64
5.5 : Identitas Responden Berdasarkan Latar belakang Tingkat Pendidikan Pada Masyarakat Yang Tinggal di Sekitar Pabrik Sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.....	64
5.6 : Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Menetapkan Standar terhadap (Pegawai Dinas Lingkungan Hidup).....	67
5.7 : Distribusi Tanggapan Informan Karyawan Pabrik Sagu Mengenai Indikator Menetapkan Standar terhadap (Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti).....	69
5.8 : Distribusi Tanggapan Informan Masyarakat Yang Tinggal di Sekitar Pabrik Sagu Mengenai Indikator Menetapkan Standar terhadap (Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti).....	70
5.9 : Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan terhadap (Pegawai Dinas Lingkungan Hidup).....	74

5.10 : Distribusi Tanggapan Informan Karyawan Pabrik Sagu Mengenai Indikator Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan terhadap (Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti).....	75
5.11 : Distribusi Tanggapan Informan Masyarakat Yang Tinggal di Sekitar Pabrik Sagu Mengenai Indikator Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan terhadap (Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti).....	76
5.12 : Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Pelaporan terhadap (Pegawai Dinas Lingkungan Hidup)	81
5.13 : Distribusi Tanggapan Informan Karyawan Pabrik Sagu Mengenai Indikator Pelaporan terhadap (Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti)	81
5.14 : Distribusi Tanggapan Informan Masyarakat Yang Tinggal di Sekitar Pabrik Sagu Mengenai Indikator Pelaporan terhadap (Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti).....	82
5.15 : Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Mengambil Tindakan Perbaikan terhadap (Pegawai Dinas Lingkungan Hidup)	87
5.16 : Distribusi Tanggapan Informan Karyawan Pabrik Sagu Mengenai Indikator Mengambil Tindakan Perbaikan terhadap (Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti).....	88
5.17 : Distribusi Tanggapan Informan Masyarakat Yang tinggal di Sekitar Pabrik Sagu Mengenai Indikator Mengambil Tindakan Perbaikan terhadap (Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup	

Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti).....	89
5.18 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Pegawai Dinas Mengenai Seluruh Indikator Terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah di Kecamatan Tinbing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti	93
5.19 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Karyawan Pabrik Sagu Mengenai Seluruh Indikator Terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah di Kecamatan Tinbing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti	95
5.20 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Yang Tinggal di Sekitar Pabrik Sagu Mengenai Seluruh Indikator Terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah di Kecamatan Tinbing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti	96

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Daftar Pertanyaan (Kuisisioner) Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti	104
2 Daftar Pertanyaan (Wawancara) Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.....	109
3 SK Dekan NO. 157/UIR-Fs/Kpts/2019 Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi An. Sufriyandi.....	116
4 Surat Rekomendasi Riset No. 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/28504 Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Provinsi Riau, Perihal Izin Penelitian An. Sufriyandi	117
5 Surat Keterangan Dinas Lingkungan Hidup No. 071/DLH-SET/033 Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.....	118
6 Dokumentasi Penelitian Pelaksanaan Fungsi Pngawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti	119

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Sufriyandi
NPM : 157110005
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya melangga dan belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, April 2020

Pelaku Pernyataan,



Sufriyandi

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN
HIDUP TERHADAP PABRIK SAGU DALAM PENGELOLAAN LIMBAH
DI KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI**

**ABSTRAK
Sufriyandi**

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pengawasan, Limbah Sagu, Baku Mutu Lingkungan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Masalah peneliti bagaimana tanggapan Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan Pengawasan terhadap pabrik-pabrik sagu yang melanggar aturan membuang limbah sagu secara langsung kesuangai. Indikator dari penelitian ini adalah Menetapkan standar, Evaluasi pelaksanaan pengawasan, Pelaporan, Mengambil tindakan Perbaikan.

Metode Penelitian yang digunakan yaitu Survey Diskriptif dengan menggunakan metode Campuran yaitu dengan menggabungkan metode Kuantitatif dan Kualitatif. Dengan teknik Observasi, Wawancara, Kuesioner, dan Dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini menggunakan kuisisioner dan wawancara, yang menjadi informan inti (*key informan*) adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup, dan Kepala Sanksi Dinas Lingkungan Hidup. Dan yang menjadi informan adalah Karyawan Pabrik Sagu, dan Masyarakat Yang Tinggal di Sekitar Pabrik Sagu. Sumber data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dala Pengelolaan Limbah Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti “**Cukup Setuju**”

**IMPLEMENTATION OF LIVING ENVIRONMENTAL SUPERVISION
FUNCTION ON SAGU FACTORY IN WASTE MANAGEMENT IN HIGH
CLIFFS DISTRICT, MERANTI KEPULAUAN DISTRICT**

ABSTRACT

Sufriyandi

Keywords: *Implementation, Supervision, Sago Waste, Environmental Quality Standards.*

The purpose of this study was to determine the Implementation of the Environmental Supervision Function of the Sago Factory in Waste Management in Tebing Tinggi District, Kepulauan Meranti District. The problem of the researcher is how the Environment Department responded in supervising sago factories that violated the rules to dispose of sago waste directly to the industry. The indicators of this research are: Setting standards, evaluating the implementation of supervision, reporting, taking corrective actions.

The research method used is descriptive survey using a mixed method that is by combining quantitative and qualitative methods. Using Observation, Interview, Questionnaire, and Documentation techniques. Primary data sources in this study used questionnaires and interviews, which became the key informants (key informants) were the Head of the Environmental Service, the Head of the Environmental Service Division, and the Head of the Environmental Service Sanction. And the informants are Sago Factory Employees, and People Who Live Around the Sago Factory. Secondary data sources were collected using observation techniques. The results of the study showed that the Implementation of the Environmental Supervision Function of the Sago Dala Factory Waste Management in Tebing Tinggi Subdistrict, Kepulauan Meranti Regency was "Quite Agree"

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang berbentuk republik, sebagai mana yang tercantum dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 1 “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik”. Tujuan negara republik Indonesia sebagai mana yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 ialah : “untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan berdasarkan kepada Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia (Pancasila).

Menurut Siagian (2003;2) mendefinisikan administrasi sebagai kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sebuah organisasi merupakan wadah bagi orang-orang di dalamnya untuk mencapai tujuan dengan segala sesuatu sumber dayanya yang bersifat terbatas. Untuk itu sangat diperlukan kegiatan manajerial untuk mengatur sumber daya-sumber daya yang terbatas tersebut dan bagaimana tujuan-tujuan organisasi tersebut bisa tercapai.

Manajemen mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upaya-upayanya yang terbaik melalui tindakan yang ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, untuk menjalankan suatu roda pemerintahan yang baik maka diperlukan manajemen yang baik juga agar pelaksanaannya pemerintahan tersebut dapat berjalan dengan maksimal. Tujuan dibentuknya pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan daya saing daerah dalam sistem NKRI. Di sisi lain, pelaksanaan otonomi daerah harus menjamin keserasian hubungan antara daerah-daerah lain untuk membangun kerjasama demi meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antara daerah. Pelaksanaan otonomi daerah mengandung prinsip otonom yang seluas-luasnya, artinya daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan pusat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Sejalan dengan hal diatas, Dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan

oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang diberikan dengan pelayanan dasar, meliputi :

- a. Pendidikan.
- b. Kesehatan.
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang.
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman.
- e. Ketentraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan masyarakat.
- f. Sosial.

Dari sejumlah urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, salah satunya adalah melakukan kewenangan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang seperti kilang-kilang sagu. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang membuka usaha pengelolaan dan pengusaha kilang sagu yang tidak memiliki izin sehingga merugikan pendapatan asli daerah yang berasal dari perizinan.

Pembentukan Kabupaten Meranti merupakan pemekaran dari kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008, Dasar hukum berdirinya kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009.

Tuntutan pemekaran kabupaten Kepulauan Meranti sudah diperjuangkan oleh masyarakat Meranti sejak tahun 1957. Seruan pemekaran kembali diembuskan oleh masyarakat pada tahun 1970 dan 1990-an hingga tahun 2008, yang merupakan satu-satunya kawedanan di Riau yang belum dimekarkan saat itu, dengan perjuangan gigih sejumlah tokoh masyarakat Meranti maka pada tanggal 25 Juli 2005 dibentuklah Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Meranti (BP2KM) sebagai wadah aspirasi masyarakat Meranti untuk memekarkan diri dari kabupaten Bengkalis. Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat tersebut maka dituangkan dalam :

1. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05/KPTS/P/DPRD/1999/2000 tanggal 17 Juni 1999 tentang Persetujuan Terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkalis
2. Surat Bupati Bengkalis Nomor 135/TP/876 tanggal 17 Juni 1999, Perihal dukungan terhadap pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor 16/KPTS/DPRD/2008 tanggal 11 Juli 2008.
4. Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/21.16.a tanggal 9 Juni 2008 Perihal Dukungan terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.24 tanggal 8 September 2008 perihal Rekomendasi Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Keputusan Gubernur Riau Nomor 1396/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.32 tanggal 18 Desember 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan maka tanggal 19 Desember 2008 Pemerintah memutuskan dan menetapkan terbentuk Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau.

Seiring waktu masa diawal Pemerintahan Republik Indonesia, kota selatpanjang dan sekitarnya ini merupakan Wilayah Kewedanan di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Tebing tinggi. Pada tanggal 19 Desember 2008, daerah Selatpanjang dan sekitarnya ini berubah menjadi Kabupaten Kepulauan Meranti memekarkan diri dari Kabupaten bengkalis dengan ibu kota Selatpanjang.

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu kabupaten diprovinsi Riau, Indonesia, dengan ibu kotanya adalah SelatPanjang. Luas kabupaten kepulauan Meranti adalah 3707,84 km, sedangkan luas kota SelatPanjang adalah 45,44 km. Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari Pulau Tebing Tinggi, Pulau Padang, Pulau Merbau, Pulau Rangsang, Pulau Topang, Pulau Manggung, Pulau

Panjang, Pulau jadi, Pulau Setahun, Pulau Tiga, Pulau Baru, Pulau Paning, Pulau Dedap, Pulau Berembang, Pulau Burung. Adapun nama Meranti diambil dari nama gabungan yaitu Pulau Merbau, Pulau Rangsang dan Pulau Tebing Tinggi.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan Kabupaten penghasil sagu terbanyak di Indonesia, jumlah kilang sagu yang terdata sebanyak, Tebing Tinggi berjumlah 3 Pabrik, Tebing Tinggi Barat berjumlah 38 Pabrik, Tebing Tinggi Timur berjumlah 36 pabrik, Rangsang berjumlah 4 pabrik, Rangsang Pesisir berjumlah 5 Pabrik, Merbau berjumlah 6 Pabrik, Pulau Merbau berjumlah 3 pabrik, dan yang terakhir Tasik Putri Puyu berjumlah 5 pabrik. Total keseluruhan pabrik sagu yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu 100 pabrik.

Tabel 1.1 : Daftar Keseluruhan Pabrik Sagu dan Daftar Izin Usaha UKL/UPL Yang Ada di Kabupaten Kepulauan Meranti

Nama Kec	Tebing Tinggi		Tebing Tinggi Barat		Tebing Tinggi Timur		Rangsang		Rangsang Pesisir		Merbau		Pulau Merabu		Tasik Putri Puyu	
	Ada Izin	Tidak Ada Izin	Ada Izin	Tidak Ada Izin	Ada Izin	Tidak Ada Izin	Ada Izin	Tidak Ada Izin	Ada Izin	Tidak Ada Izin	Ada Izin	Tidak Ada Izin	Ada Izin	Tidak Ada Izin	Ada Izin	Tidak Ada Izin
No Izin UKL/UPL	3	-	31	7	14	22	1	3	4	1	4	2	1	2	5	-
Jumlah																100

sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti 2020.

Adapun tabel 1.2 dari Kilang/Pabrik Sagu yang diawasi oleh Dinas Lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya di Kecamatan Tebing Tinggi yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.2 : Daftar Nama Perusahaan Sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan meranti

No	Badan Usaha	Nama Perusahaan	Nama Pabrik	Jalan	Desa/Kel	Kec	Komoditi	Jenis Produk
1	PO	Kilang Sagu Ernita	Ernita	Jl. Sei Sekat Simpang Ocit	Banglas	Tebing Tinggi	Tepung Sagu	Tepung Sagu
2	PO	Kilang Sagu Adnan Kusnan	Adnan Kusnan	Jl. Sei Sekat SMP Kontan	Banglas	Tebing Tinggi	Tepung Sagu	Tepung Sagu
3	PO	Kilang Sagu Lie Bek Su	Heman	Sungai Pengelam	Banglas	Tebing Tinggi	Tepung Sagu	Tepung Sagu

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan meranti 2020.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di dalam Pasal 49 yang dimana penjelasannya yaitu :

1. Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup daerah.
2. Bupati mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup.
3. Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati menetapkan PPLHD yang merupakan pejabat fungsional.

Pasal 51, ayat (1) PPLHD yang dimaksud dalam pasal 49 ayat (3)

berwenang:

- a. Melakukan pemantauan
- b. Meminta keterangan
- c. Membuat salinan dari dokumen

- d. Membuat catatan yang diperlukan
- e. Memotret
- f. Membuat rekaman audio visual
- g. Mengambil sampel
- h. Memeriksa peralatan
- i. Memeriksa instalasi, dan / atau alat
- j. Transportasi
- k. Memberhentikan pelanggaran tertentu.

Ayat (2) Dalam melaksanakan tugasnya, PPLHD dapat mekukan koordinasi dengan PPNS daerah, ayat (3) penanggungjawab usaha dan kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas PPLHD.

Selanjutnya Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti mengeluarkan peraturan tentang pencemaran lingkungan hidup (PERBUP) No. 84 Tahun 2018 pasal 9 yang menjelaskan tentang (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas-tugas Pengelolaan dan Pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu pusat kerja yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan mengatur dalam bagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti di bidang Lingkungan Hidup.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. pembinaan dan pelayanan dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup dan perencanaan dan kajian dampak lingkungan;

- c. pelaksanaan teknis pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup dan perencanaan dan kajian dampak lingkungan.

Dalam pasal 11 Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup mempunyai tugas Menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat dan Melakukan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Uraian Tugas Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- a. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g. sosialisasi tata cara pengaduan; dan
- h. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- i. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- j. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- k. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- l. pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- m. pembentukan tim koordinasi penegakan hokum lingkungan;
- n. pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- o. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan

- p. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan Penanganan barang bukti dan penanganan hokum pidana secara terpadu.

Selanjutnya Pelaporan dokumen Usaha Pengelolaan Lingkungan dan Usaha Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) wajib dilaporkan setiap permester (enam bulan sekali) oleh penanggung jawab usaha atau pemilik industrial sagu tersebut ke pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian dokumen UKL-UPL di periksa dan evaluasi guna menjadi acuan tahapan terhadap penilaian apakah memenuhi standar dan aturan yang berlaku. Setiap pelanggaran yang di dapatkan menjadi tahapan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan sikap terhadap penyimpangan yang dilakukan penanggung jawab usaha tersebut.

Dinas Lingkungan Hidup wajib melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan wajib dilakukan secara periodik dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dalam rangka menentukan tingkat penataan. Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pencemaran limbah akibat keberadaan industri sagu ini sudah terjadi sejak lama, adanya kecendrungan industri sagu membuang limbah ke sungai berdampak pada perubahan parameter air baik dari sisi warna dan rasa sehingga air keruh, kotor dan berbuih serta berbau busuk yang menyengat sepanjang aliran yang kemudian bermuara ke laut. Limbah industri dari pengolahan sagu semacam ini di sebut dengan repu sagu. Untuk itu sangat diperlukan usaha untuk mengatasi

permasalahan tersebut salah satunya izin UKL dan UPL yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti :

Limbah repu sagu yang yang dibuang dalam waktu yang lama dan dibiarkan tertimbun maupun yang teraliri ke sungai akan menyebabkan rusaknya unsur-unsur kimia dan zat renik tanah. Akibatnya tingkat kesuburan tanah menjadi rusak dan tanaman mati di usia muda, selanjutnya pencemaran air juga mengurangi kualitas air dan ekosistem didalam air seperti ikan akan mati yang kemudian berdampak pada hasil tangkapan nelayan semakin berkurang. Ini di dasarkan sebagian besar Industri Sagu belum memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).

Industri sagu pada dasarnya harus membuat Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), hal ini berguna pada pengelolaan terhadap air limbah guna mengurangi terjadinya pencemaran terhadap air agar tidak melebihi baku mutu limbah. salah satu cara untuk mengurangi tersebut adalah membuat bak penampung/pengendapan yang berfungsi untuk pengelolaan air cucian proses pengolahan sagu.

Berdasarkan pra survey dilapangan, dapat diartikan apa bila limbah cair sagu melebihi standar baku mutu lingkungan hal ini diindikasikan sebagai sebuah pencemaran tidak wajar. Sehingga hal semacam ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman bagi pemilik industri tentang pentingnya pengelolaan limbah secara baik, sehingga tidak mencemari lingkungan yang kemudian berdampak kepada masyarakat. Menyikapi hal ini seharusnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan Pengawasan yang

insentif terhadap pembuangan limbah olahan sagu. Berdasarkan uraian diatas tersebut penulis menemukan beberapa fenomena yang terjadi yaitu :

1. Belum taatnya pemilik Pabrik Sagu terhadap teguran yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Masih adanya pabrik sagu yang belum memiliki izin usaha pengelolaan lingkungan dan usaha pemantauan lingkungan (UKL dan UPL).
3. Kecenderungan penanggung jawab usaha yang membuang limbah sagu langsung kesungai tanpa melalui pengelolaan dan pemantauan sesuai baku mutu dari Dinas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa fenomena yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : **“Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti?”**.

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis dan menjelaskan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti

1.3.2 Kegunaan Penelitian

- a. Manfaat bagi kepentingan Akademis, pengembangan ilmu administrasi Khususnya Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pabrik Sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Oleh Dinas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam bentuk penelitian langsung di lapangan. Disamping itu, hasil penelitian dapat semakin memperluas wawasan teori peneliti.
- b. Manfaat Teoritis bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan kajian bagi peneliti yang berminat tentang topik penelitian ini. Baik dengan teknik Pelaksanaan Pengawasanyang sama tapi objek berbeda, atau objek yang sama dengan Pelaksanaan Pengawasan berbeda, maupun kombinasinya. Juga dapat dijadikan bagi keperluan analisis yang lebih mendalam dan detail.
- c. Manfaat Praktis Memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam memberikan sumbangan pemikiran tentang bagaimana Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Studi Kepustakaan

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga menjadi landasan teori dalam penelitian, agar dapat diketahui bagaimana hubungan dan dimana posisi dan pengetahuan yang telah ada, perlu adanya ulasan terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan dengan topik masalah yang diangkat untuk memungkinkan pembacaan mengingat cakrawala dari segi tujuan dan hasil penelitian.

2.1.1 Konsep dan Teori Administrasi Publik

Secara etimologis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Syafrie (2012;3) bahwa administrasi berasal dari bahasa lain *ad* dan *ministrare*, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta *administration* yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, pengelolaan”.

Istilah administrasi berhubungan erat dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang dalam menjalankan kegiatan dan rutinitas kehidupan sehari-hari. Kegiatan administrasi yang teratur dan sistematis akan melahirkan keadaan organisasi yang sehat dan dinamis.

Sebagaimana dikemukakan oleh Sondang P. Siagian 2008 (dalam Wirman Syafrie 2012;9), administrasi didefinisikan sebagai kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yg didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Artinya, tidak akan terlaksana suatu kegiatan dalam organisasi apabila tidak dibarengi dengan kerjasama yang terarah.

Dalam arti sempit, administrasi dapat dicermati dari definisi berikut: Administrasi adalah rangkaian pekerjaan ketatausahaan atau kesekretariatan yang terkait dengan surat-menyurat (koresponden) dan pengelolaan keterangan tertulis lainnya.

Administrasi (Brooks adams 1913 dalam Wirman Syafri 2012:9) adalah kemampuan mengordinasikan berbagai kekuatan social sering kali bertentangan satu dengan yang lain dalam satu dengan yang lain didalam satu organisme sedemikian padunya sehingga kekuatan-kekuatan tersebut dapat bergerak sebagai satu kesatuan.

Zulkifli (2005:17) mengemukakan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses aktivitas kerja sama sejumlah dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati sebelumnya.

Administrasi pada hakikatnya adalah mengarahkan kegiatan-kegiatan kita secara terus menerus menuju tercapainya tujuan, dan mengendalikan sumber-sumber daya beserta gerak-gerik pemanfaatannya sesuai dengan peraturan-peraturan dan rencana-rencana kita.

Menurut Leonard B. White administrasi adalah suatu proses yang umum pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil (dalam Syafie 2003;4).

Manurut Hadiri Nawawi administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam Afifuddin 2012;5).

Dari beberapa pengertian diatas dapat dijelaskan bahwasannya administrasi itu ilmu yang sangat luas untuk mengatur hubungan setiap manusia, terutama pada saat manusia memiliki tujuan untuk kehidupannya. Yang mana agar tercapainya suatu tujuan dari apa yang diinginkan maka baiknya memakai sebuah konsep administrasi.

Admosudirjo (dalam Zulkifli, 2005;17) administrasi sebagai fungsi atau kegiatan (activity) adalah seperangkat kegiatan-kegiatan yang tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan organisasi modern yang menjadi wahana suatu urusan atau usaha dan sekaligus apa yang berlangsung di dalamnya.

Sedangkan menurut Liang Gie (dalam syafie 2013:4) administrasi adalah segenap rangkaian penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi itu adalah proses kerja sama beberapa orang untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien, jadi tanpa adanya kerjasama suatu organisasi itu tidak dapat akan berjalan dengan baik.

Adapun dimensi unsur-unsur administrasi menurut Pasalong (2014;3) ada tiga yaitu :

1. Adanya tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelum melaksanakan suatu pekerjaan
2. Adanya kerjasama baik sekelompok orang atau lembaga pemerintah maupun swasta
3. Adanya sarana yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga dalam melaksanakan tujuan yang hendak dicapai.

Setiap kegiatan administrasi yang dilakukan, pasti memiliki tujuan (goal) yang telah disepakati secara kelompok yang kemudian dijadikan sebagai dasar beraktivitas sehingga aktivitas-aktivitas tersebut dalam satu garis dan alur yang searah.

Administrasi menentukan kemana arah dan tujuan organisasi. Administrasi sangat penting didalam menentukan dan mengatur kegiatan organisasi. Begitu juga dengan Negara sebagai organisasi public yang begitu besar. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh aparatur Negara, tidak terlepas dari kegiatan administrasi. Pelaksanaan administrasi yang baik akan menentukan keberhasilan suatu Negara. Untuk menjalankan dan menentukan kualitas administrasi yang dijalankan oleh Negara tergantung kepada sumber daya yang dimilikinya.

2.1.2 Konsep dan Teori Organisasi Publik

Konsep Riva'i (2012;169), dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia memerlukan manusia lain. Usaha untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan tersebut dengan membentuk hubungan kerja sama dan selanjutnya membentuk kelompok-kelompok.

Organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri. Organisasi merupakan suatu unit terkoordinasi yang terdiri setidaknya dua orang, berfungsi mencapai satu sasaran tertentu atau serangkaian sasaran (Riva'i, 2012;169-170).

Dari batasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi merupakan suatu wadah atau suatu system saling mempengaruhi antara orang dalam kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi juga

sebagai tata hubungan social, dalam hal ini seorang individu melakukan proses interaksi sesamanya didalam organisasi tersebut.

Konsep organisasi adalah sebagai wadah pelaksanaan kerjasama dan juga mencakup rangkaian aktivitas pembagian tugas, penunjukkan staf, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam pencapaian tujuan organisasi (Zulkifli, 2005;74).

Organisasi menurut Robbins (1994) (dalam Syamsir Torang 2013;25) adalah suatu entitas social yang terkoordinasi secara, terdiri dari dua orang atau lebih dengan batasan yang relative teridentifikasi, yang berfungsi secara berkelanjutan untuk mencapai seperangkat sasaran bersama.

Sementara itu, Siagian (dalam Zulkifli 2009;71) mendefinisikan organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang /sekelompok orang yang disebut bawahan.

Dari beberapa defenisi dan penjelasan yang telah disampaikan oleh beberapa ahli tersebut, maka hal itu dapat membuktikan ahwa dewasa ini masyarakat dimanapun berada tidak lepas dari praktik-praktik organisasi dalam kehidupan nya. Dilingkungan masyarakat, baik itu organisasi formal maupun informal selalu ada seseorang yang dianggap lebih dari yang lain yang merupakan bentuk organisasi secara hierarki.

Sebagai suatu proses, organisasi serangkaian kolektif sekelompok orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas

tertentu, pendelegasian wewenang, pengawasan dan diakhiri dengan pengevaluasian pelaksanaan tugas (Zulkifli, 2005;128).

Dari defenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan suatu tempat dimana administrasi dijalankan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Aspek dari organisasi yang dikemukakan oleh Weber (dalam Thoha, 2011;166) ialah bahwa suatu organisasi atau kelompok kerjasama mempunyai unsur-unsur *properties* sebagai berikut :

- a. Organisasi merupakan tata hubungan social. Dalam hal ini seseorang individu melakukan proses interaksi sesamanya didalam organisasi tersebut.
- b. Organisasi mempunyai batasan-batasan tertentu (*bounderles*). Dengan demikian, seorang individu yang melakukan hubungan interaksi dengan lainnya tidak didasarkan atas kemauan sendiri. Akan tetapi, mereka dibatasi oleh peraturan-peraturan tertentu.
- c. Organisasi merupakan suatu kumpulan tata ruang, yang bisa membedakan suatu organisasi dengan kumpulan-kumpulan kemasyarakatan.
- d. Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur yang didalamnya berisi wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan sesuatu fungsi tertentu. Istilah lain dari fungsi ini ialah terdapatnya hierarki. Konsekuensi dari adanya hierarki ini ialah bahwa didalam organisasi ada pimpinan atau kepala dan bawahan atau staff.

Blake dan Mouton (dalam Miftah Thoha, 2008;168) mengenalkan adanya

tujuh unsur yang melekat pada organisasi antara lain;

1. Organisasi senantiasa mempunyai tujuan
 2. Organisasi mempunyai kerangka (*structure*)
 3. Organisasi mempunyai sumber keuangan
 4. Organisasi mempunyai cara yang memberikan kecakapan bagi anggotanya untuk melaksanakan kerja mencapai tujuan tersebut (*Row-how*)
 5. Didalam organisasi terdapat Prosesinteraksi hubungan kerja antara orang-orang yang bekerjasama mencapai tujuan tersebut.
 6. Organisasi mempunyai pola kebudayaan sebagai dasar cara hidupnya.
 7. Organisasi mempunyai hasil-hasil yang ingin dicapainya.
- Menurut Zulkifli (2005;131) mengatakan bahwa sebuah organisasi sebagai

system apapun bentuk dan juga sistemnya adalah bersifat dinamis dan juga terbuka. Terbuka karena tidak mungkin menghindari dari berbagai bentuk pengaruh perubahan yang datang dari aspek lingkungan, terutama lingkungan eksternal.

Dari batasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi merupakan suatu wadah atau suatu system saling mempengaruhi antara orang dalam kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi juga sebagai tata hubungan social, dalam hal ini seseorang individu melakukan proses interaksi sesamanya didalam organisasi tersebut. organisasi diciptakan sebagai kolektivitas yang sengaja dibentuk untuk mencapai suatu tujuan khusus tertentu yang sedikit banyak didasarkan pada asas kelangsungan.

Keefektifan di defeniskan sebagai sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan tujuan tujuannya. Namun, didalam defenisi tersebut tersembunyi makna ganda yang sangat membatasi baik penelitian mengenai subjek tersebut maupun kemampuan para manejer praktek untuk menangkap arti dan menggunakan konsep tersebut. (Robbins. 1994:53).

Menurut John P. Carnpell (dalam Robbins 1994:55). Pada tahun 1960-an dan permulaan 1970-an kita melihat adanya perkembangbiakan kajian efektif organisasi. Suatu tujuan mengenai kajian ini mendefenisikan tiga puluh kriteria berbeda yang semuanya mengaku dapat mengukur “keefektifan organisasi” yaitu :

1. Keefektifan keseluruhan
2. Produktivitas
3. Efisiensi
4. Laba
5. Kualitas

6. Kecelakaan
7. Pertumbuhan
8. Kemangkiran
9. Pergantian pegawai
10. Kepuasan kerja
11. Motivasi
12. Moral/semangat juang
13. Kontrol
14. Konflik/solidaritas
15. Fleksibilitas/penyesuaian
16. Perencanaan dan penetapan tujuan
17. Konsensus tentang tujuan
18. Internalisasi tujuan organisasi
19. Konsensus tentang tujuan
20. Keterampilan interpersonal manajerial
21. Keterampilan manajerial
22. Management informasi dan komunikasi
23. Kesiapan
24. Pemanfaatan lingkungan
25. Evaluasi pihak luar
26. Stabilitas
27. Nilai sumber daya manusia
28. Partisipasi dan pengaruh yang digunakan bersama
29. Penekanan pada pelatihan dan pengembangan
30. Penekanan pada performa.

2.1.3 Konsep dan Teori Manajemen Publik

Istilah manajemen (*management*) telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda. Manajemen pada hakekatnya berfungsi untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan umum yang telah ditentukan pada tingkat administrasi.

Menurut Manulang (dalam Zulkifli 2015;4) pengertian manajemen dapat dilihat dari tiga pengertian :

- a. Manajemen sebagai proses
- b. Manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia
- c. Manajemen sebagai ilmu (*science*) dan seni (*art*)

Koonzt dan O'donnel mengemukakan manajemen adalah usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain (dalam Marnis, 2009:3).

Siagian (2003) manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Dari penjelasan para ahli, penulis berkesimpulan bahwa manajemen adalah kerangka kerja yang terdiri dari berbagai komponen yang secara keseluruhan saling berkaitan yang diorganisir sedemikian rupa dalam rangka mencapai suatu tujuan, serta pentingnya manajemen bagi setiap organisasi terutama pada bagian manajerial, karena setiap manajer atau pemimpin harus memiliki ilmu manajemen yang bertujuan untuk mengatur dari pada organisasi yang dipimpinnya.

Siagian dalam (Zulkifli, 2005;85) mengemukakan fungsi-fungsi manajemen terdiri dari:

1. Perencanaan (*planning*)
2. Pengorganisasian (*organizing*)
3. Pemberian motivasi (*motivating*)
4. Pengawasan (*Controlling*)
5. Penilaian (*Evaluating*)

Penjelasan dari fungsi-fungsi manajemen ialah :

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Manajer mengevaluasi

berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tak dapat berjalan.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, dan pada tingkatan mana keputusan harus diambil.

3. Pemberian motivasi (*motivating*)

Merupakan salah satu fungsi manajemen berupa pemberian inspirasi, semangat dan dorongan kepada bawahan, agar bawahan melakukan kegiatan secara suka rela sesuai apa yang diinginkan oleh atasan

4. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan atau controlling sering juga disebut pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud dengan tujuan yang telah digariskan semula.

5. Penilaian (*evaluating*)

adalah aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai dimana pelaksanaan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan adanya penilaian maka akan dapat diketahui kekurangan dan kelemahan sehingga dapat direncanakan cara memperbaikinya.

Sementara menurut Siswanto (2005;2) manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.

Dari penjelasan diatas manajemen dapat diartikan sebagai seni dan ilmu yaitu seni yang dimaksud sebagai suatu keahlian, kemahiran, kemampuan, dan keterampilan dalam aplikasi ilmu pengetahuan untuk mencapai tujuan, sementara manajemen suatu ilmu ialah akumulasi pengetahuan yang telah disistematisasikan dan diorganisasikan untuk mencapai kebenaran umum (*general purpose*) (dalam Siswanto, 2005;3).

Selanjutnya Hasibuan (2002;2) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen ini terdiri dari 6 unsur (6M) yaitu : Man, Money, Methode, Machines, Materials dan market.

Menurut Terry manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan planing, organaizing, actuating, dan controlling, dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian yang diikuti secara beruntun dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula (dalam Hamim, 2003;36).

Berdasarkan pendapat diatas tentang konsep manajemen dapat disimpulkan manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya yang ada dalam rangka usaha untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Dari beberapa definisi yang diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan aktivitas atau proses untuk mencapai tujuan melalui kerjasama dengan orang lain, baik di dalam organisasi maupun diluar organisasi dengan membangun *net working* seperti pelanggan, public maupun pihak-pihak lain demi kesuksesan organisasi.

2.1.4 Konsep dan Teori Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia yang dijelaskan oleh Simamora (dalam Sutrisno, 2014;5) ialah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja.

Menurut Fathoni (2006;10) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah proses pengendalian berdasarkan fungsi manajemen terhadap daya yang bersumber dari manusia

Manusia sebagai penggerak organisasi harus diawasi dan diarahkan agar apa yang menjadi tanggung jawab dan tugas dapat sejalan dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Desler (dalam Sutrisno, 2014;5) manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai suatu kebijakan dan praktik yang dibutuhkan seseorang yang menjalankan aspek “orang” atau sumber daya manusia dari posisi seorang manajemen, meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, pengimbalan, dan penilaian.

Sedangkan Umar (dalam Sutrisno, 2014;7) menjelaskan manajemen Sumber

Daya Manusia menurut tugasnya dapat dikelompokkan atas tiga fungsi yaitu :

- a. Fungsi Manajerial: Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, dan Pengendalian
- b. Fungsi Operasional: Pengadaan, Pengembangan, Kompensasi, Pengintegrasian, Pemeliharaan, dan Pemutusan hubungan kerja.
- c. Fungsi ketiga ialah kedudukan manajemen sumber daya manusia dalam mencapai tujuan organisasi perusahaan secara terpadu

Sedangkan menurut Schuler et al. (dalam Sutrisno, 2014;8), setidaknya

MSDM memiliki tiga fungsi utama yaitu :

- a. Memperbaiki tingkat produktivitas
- b. Memperbaiki kualitas kehidupan kerja
- c. Meyakinkan organisasi telah memenuhi aspek-aspek legal.

Dalam usaha pencapaian tujuan organisasi, permasalahan yang dihadapi manajemen bukan hanya terdapat pada metode, alat-alat kerja, uang, sumber daya alam dan lingkungan kerja saja, tetapi juga menyangkut karyawan (sumber daya manusia) yang mengelola atau menjalankan organisasi tersebut. Untuk itu, MSDM sangat dibutuhkan guna mencapai tiga fungsi utama yang diharapkan dapat membantu pencapaian tujuan organisasi dan kelompok.

Manajemen Sumber Daya Manusia memiliki fungsi-fungsi yang dijelaskan oleh Hasibuan. Adapun fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Hasibuan (2012;21-23) tersebut ialah sebagai berikut :

1. Perencanaan
Perencanaan (*Human Resources Planning*) adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan
2. Pengorganisasian
Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasikan semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagian organisasi (*organization chart*)

3. Pengarahan
Pengarahan (*Directing*) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.
4. Pengendalian
Pengendalian (*controlling*) adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana
5. Pengadaan
Pengadaan (*procurement*) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan
6. Pengembangan
Pengembangan (*development*) adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan
7. Kompensasi
Kompensasi (*compensation*) adalah pemberian balas jasa langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*), uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan,
8. Pengintegrasian
Pengintegrasian (*Integration*) adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan,
9. Pemeliharaan
Pemeliharaan (*maintenance*) adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pension,
10. Kedisiplinan
Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal,
11. Pemberhentian
Pemberhentian (*separation*) adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari perusahaan.

Dalam menjalankan fungsi manajemen, seorang manajer dituntut harus mampu mengarahkan, menempatkan, dan mendayagunakan para bawahan atau anggota dalam organisasi agar kinerja dapat terarah dan sistematis. Sehingga, setiap kebijakan yang dirumuskan dalam upaya menapai tujuan bersama dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia adalah semua orang yang melakukan aktivitas dengan kemampuan daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh setiap individu.

2.1.5 Konsep dan Teori Pengawasan

Menurut Zulkifli (2005:204) Pengawasan adalah dapat dikatakan salah satu fungsi seorang manajer yang bertujuan untuk memperoleh suatu tingkat keterjaminan dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi.

Selanjutnya secara umum teknik pengawasan menurut Zulkifli (2005;221) dapat dibagi dua yaitu :

- a. Pengawasan intern yaitu pengawasan yang dilakukan baik secara langsung atau pun tidak oleh kalangan manajemen organisasi terhadap tingkat pelaksanaan dan pencapaian target atau sasaran setiap kegiatan operasional unit organisasi yang telah ditetapkan.
- b. Pengawasan ekstren yaitu pengawasan yang dilakukan baik secara langsung atau pun tidak oleh suatu tim konsultan lembaga profesional yang indeviden yang sengaja ditunjukkan kan oleh kalangan manajemen organisasi melalui suatu persetujuan kerja sama atau *memorandum of understanding* terhadap tingkat pelaksanaan dan pencapaian target atau sasaran setiap operasional unit organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Harahap (2004;12) pengawasan adalah merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berupa agar visi, misi, tujuan dan rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai sebagai mestinya.

Menurut Wijayanti (2008;117) pengawasan adalah suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai.

Selanjutnya tipe pengawasan wijayanti (2008;117)

- a. *Feedforward control* (kegiatan belum dilaksanakan) artinya direncanakan untuk mengantisipasi masalah-masalah dan penyimpanan dari standar tujuan dan memungkinkan koreksi sebleum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.
- b. *Concurren control* (kegiatan sedang dilaksanakan) artinya merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus

disetujui dulu sebelum suatu kegiatan dilanjutkan untuk menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.

- c. *Feedback control* (kegiatan telah dilaksanakan) artinya mengukur hasil-hasil dari semua kegiatan yang telah dilaksanakan.

Adapun atau langkah-langkah pengawasan yang lebih terperinci dikemukakan oleh Terry (dalam Zulkifli, 2005;2009) sebagai berikut :

- a. Menetapkan standart
- b. Menetapkan pelaksanaan kegiatan pengawasan (data hasil pengamatan, laporan dan statistic)
- c. Mengadakan perbandingan terhadap pelaksana kegiatan
- d. Koreksi, penyusunan kegiatan operasional supaya mencapai hasil yang sama seperti direncanakan.

Pengawasan pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan penyimpangan, ketidak sesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.

Menurut Mokler pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan, mendesain sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan yang sedang digunakan sedapat mungkin secara efisien dan efektif guna mencapai sasaran perusahaan (dalam Siswanto, 2013:139)

Pengawasan memiliki peran yang sangat penting guna membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, siswanto (2013;140) menyatakan terdapat 4 langkah dalam pengawasan, yaitu sebagai berikut:

1. Menetapkan standart dan metode untuk pengukuran kinerja
2. Mengukur kinerja
3. Membandingkan kinerja sesuai dengan standart
4. Mengambil tindakan perbaikan

Menurut Duncan (dalam Harahap 2004;12) pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan agar visi, misi atau tujuan organisasi tercapai dengan mulus tanpa penyimpangan yang berarti.

Handoko (2009:366) mengatakan ada beberapa faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi. Faktor-faktor itu adalah :

1. Perubahan lingkungan organisasi. Melalui pengawasan manajer mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi, sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan-perubahan yang terjadi.
2. Peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati.
3. Kesalahan-kesalahan. Sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan-kesalahan tersebut sebelum menjadi krisis.
4. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang tanpa sistem pengawasan manajer tidak dapat memeriksa pelaksanaan tugas bawahannya.

Menurut Handoko (2009:373) untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi kreteria tertentu. Kriteria-kriteria utama adalah bahwa sistem sebenarnya 1) mengawasi kegiatan kegiatan yang benar, 2) tepat waktu, 3) dengan biaya yang efektif, 4) tepat, akurat, dan 5) dapat diterima oleh yang bersangkutan semakin dipenuhinya kreteria-kreteria tersebut semakin efektif sistem pengawasan. Karakteristik-karakteristik pengawasan yang efektif adalah sebagai berikut :

1. Akurat, informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dalam sistem pengawasan dapat menyebabkan orgaisasi

mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.

2. Tepat waktu. Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.
3. Obyektif dan menyeluruh. Informasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap.
4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategi. Fungsi pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.
5. Realistik secara ekonomis. Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah, atau paling tidak sama, dari kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.
6. Realistik secara organisasional. Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan organisasi.
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi.
8. Fleksibel. Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.
9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan, baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil.
10. Diterima para anggota organisasi. Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab, dan prestasi.

Menurut Ulbert (2007:128). Efisiensi adalah berhubungan dengan rasio output dengan input atau keuntungan biaya.

Sedangkan menurut H. Emerson. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input dan output, antara keuntungan dan biaya, antara hasil pelaksanaan dengan sumber-sumber yang digunakan dalam pelaksanaan, seperti halnya juga maksimum yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan dengan apa yang harus diselesaikan (dalam Soewarno. 1990:15).

Selanjutnya Efisiensi adalah tingkat perbandingan antara masukan (input) dengan hasil (output) yang dicerminkan dalam rasio atau perbandingan antara

keduanya. Jika output lebih besar dari input maka dapat dikatakan efisiensi dan sebaliknya jika input lebih besar dari output maka dikatakan tidak efisien. Jadi tinggi rendahnya efisien ditentukan oleh besar kecilnya rasio yang dihasilkan. (Riki, 2005:158).

Menurut Handoko (1998), proses pengawasan biasanya terdiri dari paling sedikit lima tahap (langkah). Tahap-tahapnya adalah sebagai berikut:

1. Penetapan standar pelaksanaan

Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Adapun bentuk standar yang lebih khusus antara lain target penjualan, anggaran, bagian pasar, margin keuntungan, keselamatan kerja dan sasaran produksi.

Ada tiga bentuk standar yang umum:

1. Standar-standar fisik; meliputi kuantitas barang atau jasa, jumlah langganan, atau kualitas produk.
2. Standar-standar moneter; yang ditunjukkan dalam rupiah dan mencakup biaya tenaga kerja, biaya penjualan, laba kotor, pendapatan penjualan, dan sejenisnya.
3. Standar-standar waktu; meliputi kecepatan produksi atau batas waktu suatu pekerjaan harus diselesaikan.

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh sebab itu, langkah kedua dalam proses pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.

Beberapa pertanyaan yang penting berikut ini dapat digunakan:

- Berapa kali (*how often*) pelaksanaan seharusnya diukur? Setiap jam, harian, mingguan atau bulanan?

- Dalam bentuk apa (*what form*) pengukuran akan dilakukan? Laporan tertulis, inspeksi visual, atau melalui telepon?
- Siapa (*who*) yang terlibat? Manajer, staf departemen?

Pengukuran yang dilakukan sebaiknya mudah dilaksanakan dan tidak mahal, serta dapat diterangkan kepada karyawan.

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu 1) pengamatan (observasi), 2) laporan-laporan, baik lisan dan tertulis, 3) metode-metode otomatis dan 4) inspeksi, pengujian (test), atau dengan pengambilan sampel.

4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai.

5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

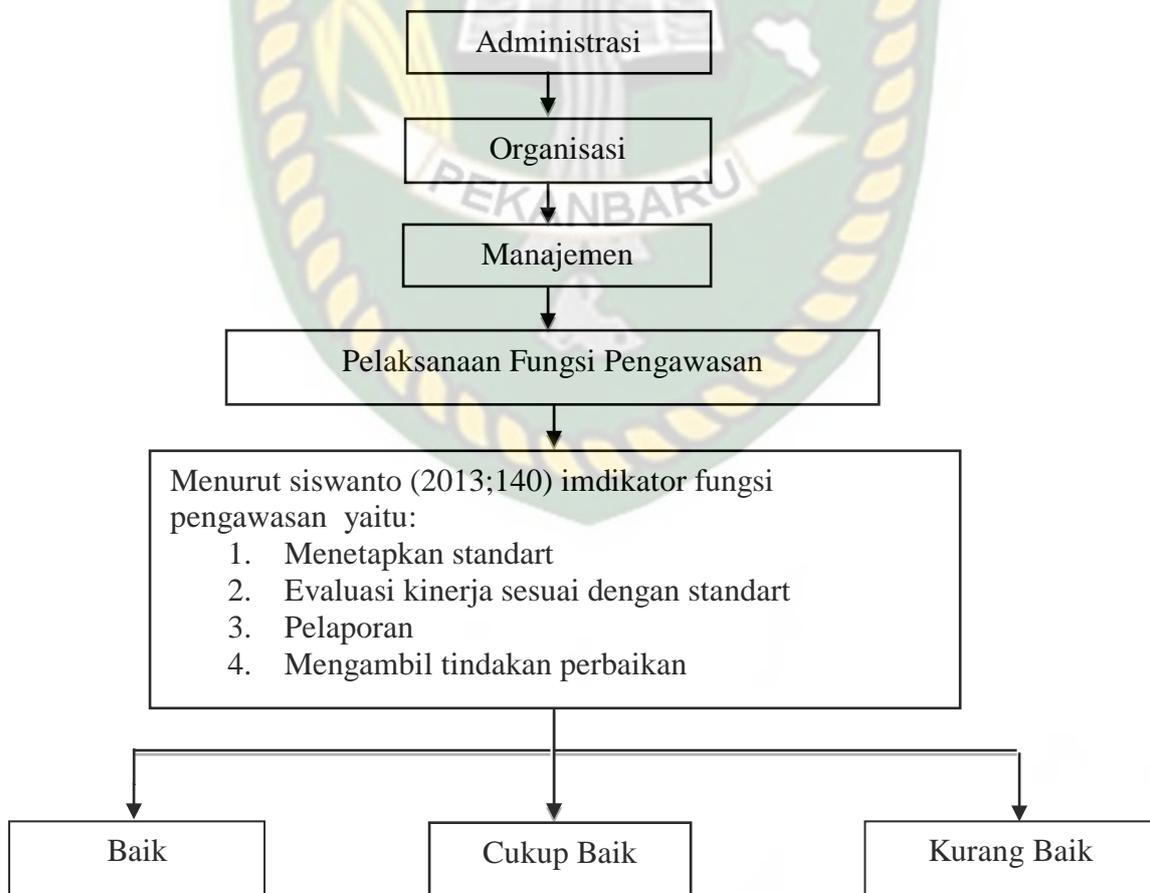
Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk, seperti:

- Mengubah standar mula-mula (barangkali terlalu tinggi atau terlalu rendah)
- Mengubah pengukuran pelaksanaan (inspeksi terlalu sering frekwensinya, atau kurang, atau bahkan mengganti sistem pengukuran itu sendiri.)
- Mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan.

2.2 Kerangka Pikir

Kerangka pikir dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai variabel penelitian beserta indikator-indikator yang terkait didalam penelitian. Kerangka pikir pada variabel penelitian ini tentang “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti” secara lebih rinci dapat dilihat pada bagan yang digambarkan dibawah ini, yaitu sebagai berikut :

Gambar 2.1 : Kerangka Pikir Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.



Sumber : Olahan Penulis Tahun 2020

2.3 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan fenomena serta konsep teoritis yang telah dikemukakan, maka dapatlah dirumuskan hipotesis Skripsi ini sebagai berikut :
diduga Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu dalam Pengelolaan Limbah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti belum terlaksana dengan baik.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Tipe dalam penelitian ini adalah survey deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya mengenai objek penelitian yang penulis teliti dengan memprioritaskan alat bantu penelitian yaitu kuisioner yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan lainnya (dalam Sugiono 2003;11).

Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yaitu definisi, pengukuran data kuantitatif dan statistic objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survey untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka.

3.2 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi Penelitian di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, terutama di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti. Dimana dalam menjalankan tugasnya sebagai Pengawasan Limbah Pabrik Sagu. Terlihat masih banyak permasalahan yang terjadi sehingga Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Limbah-limbah Pabrik Sagu terindikasi masih belum maksimal.

3.3 Konsep Operasional dan Operasionalisasi Variabel

3.3.1 Konsep Operasional

Konsep operasional variabel adalah abstrak mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik, kejadian, kelompok, atau individu. Penggunaan konsep ini diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan salah satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu dengan yang lainnya.

Penulis membuat defenisi-defenisi agar memudahkan dalam menganalisa, maka penulis akan mengoperasikan konsep-konsep yang telah dikemukakan guna memperjelas permasalahan ini, yaitu :

1. Administrasi adalah sebagai kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Organisasi adalah sebagai wadah pelaksanaan kerjasama dan juga mencakup rangkaian aktivitas pembagian tugas, penunjukkan staf, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Manajemen adalah adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.
4. Manajemen Sumber Daya Manusia ialah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja.

5. Pengawasan adalah dapat dikatakan salah satu fungsi seorang manajer yang bertujuan untuk memperoleh suatu tingkat keterjaminan dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi.
6. Menetapkan Standar, yakni disini mencakup standar dalam hal kriteria sederhana tentang kinerja yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Adanya sejumlah hal dari seluruh perencanaan program dimana kinerja dapat diukur melalui kejelasan dokumen perencanaan operasional pabrik sagu, dan kejelasan peraturan berkaitan lingkungan hidup tentang pabrik sagu dari sejumlah ketentuan aturan yang berlaku telah dijadikan standar. Kinerja ini dilaksanakan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dibidang pengawasan.
7. Evaluasi pelaksanaan pengawasan, yakni pengawasan yang dilakukan bidang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti dengan cara inspeksi langsung ke pabrik sagu dan memperhatikan sarana lainnya dengan cara pemeriksaan rutin, dan sidak. Dari hal ini adanya kegiatan membandingkan aturan pelaksanaan terhadap rencana penanggulangan limbah.
8. Pelaporan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui adanya kegiatan tindakan laporan tertulis dari hasil infeksi ke lapangan dan adanya laporan secara lisan dari petugas lapangan.
9. Mengambil Tindakan Perbaikan, disini manakala ditemukan secara langsung bahwa pabrik sagu melakukan kesalahan yang dimana

membuang limbah kesungai dan perlunya diambil tindakan berupa pengawasan untuk mencegah jika ada pembuangan limbah, sanksi bagi pabrik sagu yang masih melanggar aturan yakni akan disanksi pencabutan surat izin usaha sagu, sanksi ini diberikan agar tidak adanya lagi kerusakan lingkungan hidup.

3.3.2 Operasionalisasi Variabel

Tabel 3.1 : Konsep Operasional Variabel Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
Menurut Mokler pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan, mendesain sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur sinifikansi	Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti	1. Menetapkan Standar	<ul style="list-style-type: none"> a. Kejelasan dokumen perencanaan operasional pabrik sagu b. Kejelasan peraturan berkaitan lingkungan hidup tentang pabrik sagu c. Ketentuan aturan yang berlaku telah dijadikan standar 	<p>Baik</p> <p>Cukup Baik</p> <p>Kurang Baik</p>

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan yang sedang digunakan sedapat mungkin secara efisien dan efektif guna mencapai sasaran perusahaan (dalam Siswanto 2013:139)		2. Evaluasi pelaksanaan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Inspeksi/pemeriksaan rutin atau khusus. b. Inspeksi Mendadak (Sidak). c. Adanya kegiatan membandingkan upaya pelaksanaan terhadap rencana penanggulangan limbah 	<p>Baik</p> <p>Cukup Baik</p> <p>Kurang Baik</p>
		3. Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya laporan tertulis dari hasil inspeksi ke lapangan b. Adanya laporan lisan dari petugas lapangan 	<p>Baik</p> <p>Cukup Baik</p> <p>Kurang Baik</p>
		4. Mengambil tindakan perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menemukan dan mencegah jika ada penyimpangan pembuangan limbah b. Memberikan Sanksi peringatan tertulis. c. Melakukan Sanksi pencabutan surat izin usaha sagu. 	<p>Baik</p> <p>Cukup Baik</p> <p>Kurang Baik</p>

Sumber : Modifikasi Penulis 2020

3.4 Teknik Penarikan Sampel

1. Populasi

Populasi menurut Sugiyono (2012;80) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup (berjumlah 1 orang), Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup (berjumlah 1 orang), Kepala Seksi Dinas Lingkungan Hidup (berjumlah 3 orang), Karyawan Pabrik (berjumlah 28 orang), dan Masyarakat Yang Tinggal Di Sekitar Pabrik Sagu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti (berjumlah 20 orang).

2. Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2012;81) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi juga harus representative (mewakili).

1. Responden. Adapun teknik penarikan sampel yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, untuk Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup, dan Kepala Seksi Dinas Lingkungan Hidup menggunakan *teknik sensus*. dengan pengambilan keseluruhan populasi menjadi sampel, karena jumlah populasinya sedikit dan mudah terjangkau oleh peneliti.
2. Sedangkan Pengambilan sampel Informan untuk Karyawan Pabrik Sagu dan Masyarakat Yang Tinggal Di Sekitar Pabrik Sagu Di Kecamatan

Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Untuk menjadi jelasnya yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 : Tabel Populasi dan Sampel (Responden dan Informan) Penelitian Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

I : Responden				
No	Unit Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	1	1	100
2	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1	1	100
3	Kepala seksi Dinas Lingkungan Hidup	3	3	100
II : Informan				
No	Unit Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Karyawan Pabrik Sagu	28	14	50
2	Masyarakat Yang Tinggal Di Sekitar Pabrik Sagu	20	10	50
Jumlah :		53	29	100

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2020

3.5 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang dikumpulkan yaitu :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dan dikumpulkan dari responden (sumber data) dengan menggunakan wawancara, penyebaran kuesioner dan data ini tentunya berkenaan dengan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer, ataupun data yang di peroleh secara tidak langsung yang berasal dari buku-buku (literature), pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara yang dipakai penulis dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah teknik :

1. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung dilapangan untuk mendapatkan data yang khas dan erat hubungannya dengan penelitian ini. Alasan penulis menggunakan teknik observasi ini adalah untuk mengetahui secara langsung keadaan dilapangan agar mendapatkan data yang khas tersebut.
2. Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dan informasi secara menyeluruh dan mendalam yang dianggap yang mengerti permasalahan yang diteliti.

3. Kuesioner, yaitu mempersiapkan dan mempergunakan daftar berupa pertanyaan yang diajukan kepada responden dan informan yang diberikan pertanyaan-pertanyaan dan alternatif jawaban. Sasaran dari teknik questioner ini adalah seluruh responden.
4. Dokumentasi, yaitu data yang penulis peroleh dari penyalinan buku-buku, foto, video, arsip, peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan dari karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan.

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Teknik Analisis Data

Setelah data atau bahan-bahan yang diperlukan baik data primer maupun data sekunder, kemudian dikelompokkan berdasarkan masing-masing variable beserta indikatornya. Kemudian data dianalisis secara kuantitatif dan Kualitatif dilakukan analisa secara deskriptif, yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dan menguraikan secara seksama hasil temuan-temuan penelitian secara jelas dan singkat.

Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu cara menguraikan menyeluruh tentang suatu keadaan yang terjadi sewaktu-waktu tertentu kemudian menganalisa data tersebut dan dikaitkan dengan teori-teori yang mengandung pembahasan masalah untuk mengambil keputusan yang kemudian memberikan saran untuk alternative untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

3.7.2 Teknik Pengukuran Variabel

Baik Apabila penilaian terhadap indikator dari Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti 67-100%.

Cukup Baik Apabila penilaian terhadap indikator dari Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti 34-66%.

Kurang Baik Apabila penilaian terhadap indikator dari Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti 1-33%.

Untuk pengukuran Indikator Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu :

a. Menetapkan Standar :

Baik Apabila penilaian terhadap indikator Menetapkan Standar berada pada skala 67-100%.

Cukup Baik Apabila penilaian terhadap indikator Menetapkan Standar berada pada skala 34-66%.

Kurang Baik Apabila penilaian terhadap indikator Menetapkan Standar berada pada skala 1-33%.

b. Evaluasi Kinerja Sesuai Dengan Standar :

Baik Apabila penilaian terhadap indikator Evaluasi Kinerja Sesuai Dengan Standar berada pada skala 67-100%.

Cukup Baik Apabila penilaian terhadap indikator Evaluasi Kinerja Sesuai Dengan Standar berada pada skala 34-66%.

Kurang Baik Apabila penilaian terhadap indikator Evaluasi Kinerja Sesuai Dengan Standar berada pada skala 1-33%.

c. Pelaporan :

Baik Apabila penilaian terhadap indikator Pelaporan berada pada skala 67-100%.

Cukup Baik Apabila penilaian terhadap indikator Pelaporan berada pada skala 34-66%.

Kurang Baik Apabila penilaian terhadap indikator Pelaporan berada pada skala 1-33%.

d. Mengambil Tindakan Perbaikan :

Baik Apabila penilaian terhadap indikator Mengambil Tindakan Perbaikan berada pada skala 67-100%.

Cukup Baik Apabila penilaian terhadap indikator Mengambil Tindakan Perbaikan berada pada skala 34-66%.

Kurang Baik Apabila penilaian terhadap indikator Mengambil Tindakan Perbaikan berada pada skala 1-33%

3.8 Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel 3.3 : Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke																							
		Juni 2019				Juli 2019				Januari 2020				Feb 2020				Maret 2020				April 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Up																								
2	Seminar UP																								
3	Revisi UP																								
4	Revisi Kuesioner																								
5	Rekomendasi Survey																								
6	Survey Lapangan																								
7	Analisis Data																								
8	Penyusunan laporan hasil penelitian (skripsi)																								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	Ujian Konfereherens if skripsi																								
11	Revisi Skripsi																								
12	Penggandaan Skripsi																								

Sumber : Olahan penulis Tahun 2020.

BAB 1V

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu kabupaten di provinsi Riau, Indonesia, dengan ibu kotanya adalah Selatpanjang. Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari Pulau Tebing Tinggi, Pulau Padang, Pulau Merbau, Pulau Rangsang, Pulau Topang, Pulau Manggung, Pulau Panjang, Pulau Jadi, Pulau Setahun, Pulau Tiga, Pulau Baru, Pulau Paning, Pulau Dedap, Pulau Berembang, Pulau Burung. Adapun nama *Meranti* diambil dari nama gabungan "Pulau Merbau, Pulau Rangsang dan Pulau Tebing Tinggi.

4.1.1 Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara sekitar $0^{\circ}42' 30'' - 1^{\circ} 28' 0''$ LU, dan $102^{\circ} 12' 0'' - 103^{\circ}10' 0''$ BT, dan terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (*Growth Triagle*) Indonesia - Malaysia - Singapore (IMS-GT) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah *Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam, Tj. Balai Karimun*. Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah kabupaten Kepulauan Meranti sangat potensial berfungsi sebagai

Gerbang Lintas Batas Negara/Pintu Gerbang Internasional yang menghubungkan dengan Riau daratan dengan negara tetangga melalui jalur laut, hal ini untuk melengkapi kota Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai kota *Pusat Kegiatan Strategis Negaraya* yang berfungsi sebagai beranda depan negara, pintu gerbang internasional, niaga dan industri. Luas kabupaten Kepulauan Meranti : 3707,84 km², sedangkan luas kota Selatpanjang adalah 45,44 km².

4.1.2 Luas dan Batas wilayah Administrasi

Luas Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti 3.707,84 km² , memiliki 9 kecamatan, 5 kelurahan dan 96 desa (dari total 166 kecamatan, 268 kelurahan dan 1.591 desa di seluruh Riau). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 206.611 jiwa. Secara administrasi batas-batas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut :

1. Kabupaten Kepulauan Meranti berbatasan dengan:
2. Sebelah Utara : Selat Malaka, Kabupaten Bengkalis
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Bengkalis
5. Sebelah Timur : Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau

Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti secara administrasi terdiri atas 9 kecamatan yaitu Kecamatan Tebing Tinggi Ibu Kota Selatpanjang, Tebing Tinggi Barat Ibu Kota Alai, Rangsang Ibu Kota Tanjung Samak, Rangsang Barat Ibu Kota Batar, Merbau Ibu Kota Teluk Belitung, Pulau Merbau Ibu Kota Renak Rungun, Tebing Tinggi Timur Ibu Kota Sungai Tohor, Putri Puyu Ibu Kota Bandul, dan yang terakhir Rangsang Pesisir Ibu Kota Sonde. Kecamatan dengan

wilayah yang paling luas yaitu Merbau ibu kota Teluk Beliting (1.348,91km²), dan yang paling sempit adalah Tebing Tinggi ibu kota Selatpanjang (45,44km²)

Topografi Bentang alam kabupaten Kepulauan Meranti sebagian besar terdiri dari daratan rendah. Pada umumnya struktur tanah terdiri tanah alluvial dan grey humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah dan berhutan bakau (mangrove). Lahan semacam ini subur untuk mengembangkan pertanian, perkebunan dan perikanan.

Karakteristik dari jenis tanah ini adalah tergolong tanah dengan kedalaman solum cukup dalam dan bergambut (> 100 cm), tekstur lapisan bawah halus (liat) sedangkan lapisan atas merupakan Kemik (tingkat pelapukan sampai tingkat menengah), konsistensi tanah lekat, porositas tanah sedang, reaksi tanah tergolong sangat masam dengan pH berkisar antara 3,1–4,0 dan kepekaan terhadap erosi termasuk rendah. Formasi geologinya terbentuk dari jenis batuan endapan aluvium muda berumur holosen dengan litologi lempung, lanau, kerikil kecil dan sisa tumbuhan di rawa gambut, tidak ditemukan daerah rawan longsor karena arealnya datar, yaitu rawa gambut. Berdasarkan hasil penafsiran peta topografi dengan skala 1 : 250.000 diperoleh gambaran secara umum bahwa kawasan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagian besar bertopografi datar dengan kelerengan 0–8 %, dengan ketinggian rata-rata sekitar 1-6,4 m di atas permukaan laut. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25° - 32° Celcius, dengan kelembaban dan curah hujan cukup tinggi.

Musim hujan terjadi sekitar bulan September-Januari, dan musim kemarau terjadi sekitar bulan Februari hingga Agustus. Jenis flora yang terdapat di hutan Kabupaten Kepulauan Meranti antara lain, seperti : Meranti, Kulim, Sungkai, Punak, Jelutung, Medang, Tembusu, Bintangor, dan Bakau. Sebagian besar jenis kayu tersebut merupakan jenis komersial dan bahan baku industri. Sementara jenis fauna yang ada di daerah ini, meliputi : Lutung, Siamang, Kera, Ungka, Pelanduk, Tringgiling, Babi Hutan, Ayam Hutan, berbagai jenis ular, berbagai jenis burung seperti Elang, Selendit, Puyuh Mahkota, Puyuh Biasa, Nuri, Enggang, Punai, Pergam, Lebah Madu dll. Di daerah ini juga terdapat beberapa sungai dan tasik (danau) seperti sungai Suir di pulau Tebingtinggi, sungai Merbau, sungai Selat Akar di pulau Padang serta tasik Putri Pepuyu di Pulau Padang, tasik Nembus di pulau Tebingtinggi), tasik Air Putih dan tasik Penyagun di pulau Rangsang. Gugusan daerah kepulauan ini terdapat beberapa pulau besar seperti pulau Tebingtinggi (1.438,83 km²), pulau Rangsang (922,10 km²), pulau Padang dan Merbau (1.348,91 km²).

4.1.3 Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Meranti

Visi Kabupaten Kepulauan Meranti adalah: “Menjadikan Kepulauan Meranti Sebagai Kawasan Niaga Yang Maju dan Unggul Menuju Masyarakat Madani”. Sedangkan **Misi** Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut:

- a. Mewujudkan penataan birokrasi pemerintah yang efisien dan efektif.
- b. Menurunkan tingkat kemiskinan melalui swasembada hasil-hasil pertanian, perikanan dan peternakan.
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat dalam rangka pembangunan ekonomi lokal.
- d. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan produktivitas.

- e. Meningkatkan infrastruktur dasar dalam rangka merangkai Pulau, termasuk revitalisasi air bersih dan peningkatan elektrifikasi.
- f. Mendorong investasi dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah ekonomi.
- g. Meningkatkan pembinaan mental spiritual dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berakhlakul karimah.

4.2 Sejarah Dinas Lingkungan Hidup

Secara kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup sebelumnya merupakan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan satuan kerja perangkat yang mengembang sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup. Kantor Lingkungan Hidup berdiri tahun 2008. Pada tahun 2011 berubah menjadi Badan Lingkungan Hidup. Kemudian pada tahun 2017 Badan Lingkungan Hidup berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup yang beralamat di Jl. Pembangunan 1 Selat Panjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi.

4.2.1 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti

Dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti telah merumuskan Visi dan Misi sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup.

Visi : “Mewujudkan Kepulauan Meranti Sebagai Kawasan Yang Berwawasan Lingkungan”

Misi :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Menciptakan kota yang bersih, nyaman dan asri
4. Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

4.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup yang terdapat dalam Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 84 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut:

1. Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas

Mempunyai Tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten pada bidang Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut kepala lingkungan hidup menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Lingkungan Hidup.

- b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai Tugas mengkoordinasikan bidang-bidang perumusan, umum, kepegawaian, perencanaan program, evaluasi,

pelaporan dan administrasi keuangan dan perlengkapan. Sekretariat dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. Membuat rencana kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
- b. Menyusun rencana dan program kegiatan kesekretariatan
- c. Melaksanakan pelayanan Administrasi kesekretariatan dinas yang meliputi umum, kepegawaian, program, keuangan dan perlengkapan.
- d. Melaksanakan pengawasan urusan keuangan dengan meliputi laporan yang dibuat oleh akuntan agar pengeluaran anggaran sesuai rencana.
- e. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
Susunan organisasi sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub bagian umum, kepegawaian dan program
 - b. Sub bagian keuangan dan perlengkapan.

c. Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup mempunyai tugas pengelolaan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam menjalankan tugas dan kewajibannya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. pembinaan dan pelayanan dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup dan perencanaan dan kajian dampak lingkungan;
- c. pelaksanaan teknis pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup dan perencanaan dan kajian dampak lingkungan.

Susunan Organisasi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan Hidup, terdiri dari:

- a. Seksi pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- b. seksi penegakan hukum lingkungan hidup.
- c. seksi perencanaan dan kajian dampak lingkungan.

a. Seksi Pencemaran dan kerusakan lingkungan; mempunyai tugas Pemantauan terhadap sumber pencemar dan pengendalian terhadap pencemaran institusi dan non institusi serta tugas pengendalian dan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan. Seksi Pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemantaun sumber pencemar institusi dan non institusi.
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitasair, udara, tanah serta pesisir dan laut.
- c. Penentuan Baku mutu lingkungan.
- d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (Pemberian informasi, pengisolaian serta penghentian) umber pencemar institusi dan non institusi.
- e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (Pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi.
- f. Penentuan baku mutu sumber pencemar.
- g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan kepada masyarakat.
- h. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi.
- i. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi.
- j. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi.
- k. Penyediaan sarana prasarana pemantauan lingkungan (Laboratorium lingkungan).
- l. Penentuan kreteria baku kerusakan lingkungan.
- m. Pelaksanaan pemantauan kurusakan lingkungan.
- n. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- o. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

b. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup mempunyai tugas Menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat dan Melakukan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Uraian tugas Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- q. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- r. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- s. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- t. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- u. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- v. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- w. sosialisasi tata cara pengaduan; dan
- x. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- y. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usahadan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan danizin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- z. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- â. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- ä. pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- ö. pembentukan tim koordinasi penegakan hokum lingkungan;
- aa. pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- bb. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- cc. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan Penanganan barang bukti dan penanganan hokum pidana secara terpadu.

c. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas menginventarisasi data dan informasi sumberdaya alam dan Melakukan

Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH) serta Melakukan Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup. Uraian tugas Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. penyusunan dokumen RPPLH;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- i. penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- j. penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- k. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- l. penyusunan KLHS Provinsi;
- m. pengesahan KLHS;
- n. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- o. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- p. pemantauan dan evaluasi KLHS;
- q. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- r. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- s. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); dan
- t. pelaksanaan proses izin lingkungan.

2. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

Pada Dinas Lingkungan Hidup dapat dibentuk unit pelaksana Teknis (UPTD).

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan keahlian dan kebutuhan daerah.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden dan Informan

Dalam penyusunan penelitian skripsi ini yang paling berperan penting adalah responden, karna dari responden sebagian besar data yang diperoleh dalam penelitian. Responden dalam penelitian ini yang bertujuan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian yang berjudul Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu dalam Pengelolaan Limbah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Maka penulis melakukan Wawancara dengan Karyawan Pabrik Sagu yang berjumlah 14 orang, Masyarakat Yang Tinggal di Pabrik Sagu yang berjumlah 10 orang, dan menyebar Kuesioner kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Kepala Seksi Dinas Lingkungan Hidup yang berjumlah 3 orang.

Sehubungan dengan penelitian Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu dalam Pengelolaan Limbah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, diperlukannya data ataupun identitas responden agar penulis bisa membagikan perkelompokkan nya, maka berikut akan dipaparkan kreteria responden mulai dari Jenis Kelamin, Usia, Jengjang Pendidikan.

5.1.1 Jenis Kelamin

Jenis kelamin adalah unsur genetika dari para identitas responden yang menilai Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu dalam Pengelolaan Limbah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti., untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1 : Identitas Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Pegawai Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1.	Laki – Laki	3	60 %
2.	Perempuan	2	40%
Jumlah		5	100 %

Sumber : Data Olahan Penulis, 2019

Berdasarkan tabel 5.1 diatas diketahui bahwa jenis kelamin laki-laki sebanyak 3 orang atau 60% responden, dimana 3 orang responden laki-laki ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Pengendalian pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup, serta Kepala Seksi Dinas Lingkungan Hidup, kemudian jenis kelamin perempuan Sebanyak 2 orang atau 40% responden, dimana 2 orang responden perempuan ini adalah bagian dari Seksi Dinas lingkungan Hidup yang membantu tugas Kepala Seksi Dinas Lingkungan Hidup. Jadi, kesimpulan dari penjelasan di atas bahwa 3 orang responden ini merupakan *key informan* yang akan menilai Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu dalam Pengelolaan Limbah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tabel 5.2 : Identitas Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Karyawan Pabrik Sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1.	Laki – Laki	14	100 %
2.	Perempuan	-	0%
Jumlah		14	100 %

Sumber : Data Olahan Penulis, 2019

Berdasarkan tabel 5.2 diatas diketahui bahwa dari 14 orang responden, sebanyak 14 orang atau 100% responden laki-laki, sedangkan responden perempuan 0% atau tidak ada dikarenakan pada responden penelitian ini yang terlibat hanya laki-laki.

Tabel 5.3 : Identitas Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Masyarakat Yang Tinggal di Sekitar Pabrik Sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1.	Laki – Laki	6	60 %
2.	Perempuan	4	40%
Jumlah		10	100 %

Sumber : Data Olahan Penulis, 2019

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 10 orang responden, sebanyak 6 orang laki-laki atau 60% responden, sedangkan responden perempuan sebanyak 4 orang atau 40%.

5.1.2 Umur Responden

Usia merupakan suatu tingkat kematangan pikiran seseorang dalam rangka mengambil keutusan apa yang tidak dan harus dilakukan. Seperti diketahui umur bahwa seseorang yang lebih tua umurnya akan lebih bijaksana dalam mengambil tindakan dari pada seseorang umurnya yang lebih muda, tetapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa lebih tua umur seseorang maka kemampuan fisiknya akan lebih cepat mengalami kelelahan dalam melakukan pekerjaan jika dibandingkan dengan seseorang yang umurnya lebih muda. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka dapat dilihat pada tabel 5.2 di bawah ini:

Tabel 5.2 : Identitas Responden Berdasarkan Latar belakang Usia/Umur Pada Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

No.	Usia (Tahun)	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1.	21 – 30	1	20%
2.	31 – 40	1	20%
3.	41 – 50	1	20%
3.	51 Tahun Keatas	2	40%
Jumlah		5	100%

Sumber : Data Olahan Penulis, 2019

Dari tabel 5.2 diatas dapat dinyatakan bahwa responden dari Pegawai Dinas Lingkungan Hidup responden yang paling banyak usia/umur 51 tahun keatas sebanyak 2 orang (40%), pada usia 21 – 30 tahun berjumlah 1 orang (20%),

kemudian dari usia 31 - 40 berjumlah 1 orang (20%) dan pada usia 41 – 50 berjumlah 1 orang (20%) jadi dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini responden *key informan* yang dimintai pendapatnya lebih dominan berada pada umur 51 tahun keatas karena merupakan Kepala Dinas dan Kepala Bidang yang lebih banyak mengetahui infomasih dari permasalahan pengawasan limbah pabrik sagu.

Tabel 5.3 : Identitas Responden Berdasarkan Latar belakang Usia/Umur Pada Karyawan Pabrik Sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

No.	Usia (Tahun)	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1.	21 – 30	5	36%
2.	31 – 40	5	36%
3.	41 – 50	3	21%
3.	51 Tahun Keatas	1	7%
Jumlah		14	100%

Sumber : Data Olahan Penulis, 2019

Dari tabel 5.3 diatas dapat dinyatakan bahwa responden dari Karyawan Pabrik Sagu responden yang paling banyak usia/umur 21 – 30 tahun berjumlah 5 orang (36%) dan 31 – 40 tahun berjumlah 5 orang (36%), usia 41 – 50 tahun berjumlah 3 orang (21%) serta pada usia 51 tahun keatas jumlah 1 orang (7%). Hal ini dapat dilihat bahwa yang lebih dominan adalah karyawan yang memiliki interfal pada usia 21 – 30 tahun dan 31 – 40 tahun, alasannya adalah pada umur tersebut merupakan usia yang produktif untuk bekerja.

Tabel 5.4 : Identitas Responden Berdasarkan Latar belakang Usia/Umur Pada Masyarakat Yang Tinggal di Sekitar Pabrik Sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

No.	Usia (Tahun)	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1.	21 – 30	3	30%
2.	31 – 40	3	30%
3.	41 – 50	2	20%
3.	51 Tahun Keatas	2	20%
Jumlah		10	100%

Sumber : Data Olahan Penulis, 2019

Dari tabel 5.4 diatas dapat dinyatakan bahwa responden dari Masyarakat Yang Tinggal di Sekitar Pabrik Sagu responden yang paling banyak usia/umur 21 – 30 tahun berjumlah 3 orang (30%), dan 31 – 40 tahun berjumlah 3 orang (30%), usia 41 – 50 tahun berjumlah 2 orang (20%), serta pada usia 51 tahun keatas jumlah 2 orang (20%). Hal ini di karenakan pada saat dilapangan penulis menjumpai masyarakat yang dominannya memiliki usia 21 – 30 tahun dan 31 – 40 tahun

5.1.3 Pendidikan Responden

Pendidikan merupakan suatu usaha seseorang dalam rangka memberikan pengembangan terhadap pola pikir orang lain dalam memahami dan menilai suatu dimana dari tingkat pendidikan kita akan mengetahui kemampuan seseorang yang cenderung akan mempengaruhi pola pikir tingkah laku setiap orang semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin matang pola pikir seseorang dalam berbuat

dan bertigkah laku dalam mengambil keputusan dalam rangka melaksanakan suatu pekerjaan.

Pendidikan tidak mudah didapatkan begitu saja melainkan melalui beberapa tahapan-tahapan baik dari sekolah, lingkungan masyarakat maupun keluarga. Maka dari itu dapat kita lihat tabel pendidikan sebagai berikut.

Tabel 5.3 : Identitas Responden Berdasarkan Latar belakang Tingkat Pendidikan Pada Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1.	SD	-	-
2.	SMP	-	-
3.	SMA	-	-
4.	Strata Satu (S1)	4	80%
5.	Strata Dua (S2)	1	20%
Jumlah		5	100%

Sumber : Data Olahan Penulis, 2019

Berdasarkan tabel 5.3 diatas, dapat dilihat bahwa pendidikan terakhir responden pegawai pada Dinas lingkungan Hidup adalah S1 sebanyak 4 orang (80%) dan responden yang memiliki pendidikan S2 berjumlah 1 orang (20%), dan yang menjadi *key informan* dengan jejang pendidikan S2 berjumlah 1 orang yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta yang memiliki jejang pendidikan S1 berjumlah 2 orang yaitu Kepala Bidang dan Kepala Seksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk tingkat pendidikan terakhir pada *key informan* didominasi oleh lulusan Strata Satu (S1).

Tabel 5.4 : Identitas Responden Berdasarkan Latar belakang Tingkat Pendidikan Pada Karyawan Pabrik Sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1.	SD	5	36%
2.	SMP	4	28%
3.	SMA	5	36%
4.	Strata Satu (S1)	-	-
5.	Strata Dua (S2)	-	-
Jumlah		14	100%

Sumber : Data Olahan Penulis, 2019

Dari tabel 5.4 diatas dapat dijelaskan bahwa jenjang pendidikan terakhir responden Karyawan Pabrik Sagu adalah SMA sebanyak 5 orang (36%), SMP sebanyak 4 orang (28%), dan SD sebanyak 5 orang (36%). Jadi dapat disimpulkan yang paling dominan adalah karyawan yang memiliki tingkat pendidikan SD dan SMA, hal ini dikarenakan pada saat dilapangan penulis mendapatkan fakta bahwa masyarakat kebanyakan terpaksa memilih tidak melanjutkan sekolah dan menjadi karyawan pabrik sagu dikarenakan dulu sekolah sangat sulit untuk dijangkau karena jarak tempuhnya yang jauh dan sulit, serta keterbatasan biaya.

Tabel 5.5 : Identitas Responden Berdasarkan Latar belakang Tingkat Pendidikan Pada Masyarakat Yang Tinggal di Sekitar Pabrik Sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1.	SD	2	20%

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
2.	SMP	1	10%
3.	SMA	3	30%
4.	Strata Satu (S1)	3	30%
5.	Strata Dua (S2)	1	10%
Jumlah		10	100%

Sumber : Data Olahan Penulis, 2019

dari tabel 5.5 dapat dijelaskan bahwa pendidikan terakhir responden Masyarakat yang tinggal disekitar pabrik sagu adalah SD sebanyak 2 orang (20%), SMP sebanyak 1 orang (10%), SMA sebanyak 3 orang (30%), Strata Satu (S1) sebanyak 3 orang (30%), dan Strata Dua (S2) sebanyak 1 orang (10%).

5.2 Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu dalam Pengelolaan Limbah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pabrik Sagu dalam limbah industry sagu merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang tinggal disekitar pabrik sagu dan bagi para masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, dimana tujuan Pengendalian serta Pengawasan ini agar bisa menjadi lebih baik kedepannya dan tidak ada lagi pabrik sagu yang membuang limbah langsung kesungai.

Untuk menilai suatu keberhasilan dari pengawasan/pengendalian oleh Dinas Lingkungan Hidup maka diperlukan adanya Pengawasan yang dilakukan untuk meningkat kinerja daerah dengan cara mengetahui dan memperoleh

informasi mengenai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah dalam mencapai sebuah tujuan.

Dalam rangka untuk mengukur Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, penelitian menggunakan beberapa tolak ukur Indikator yang menjadi acuan, yaitu sabagai berikut:

1. Menetapkan Standar,
2. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan,
3. Pelaporan, dan
4. Mengambil Tindakan Perbaikan.

Oleh karna itu dalam penelitian ini akan dilakukan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, untuk itu ditelaah satu persatu untuk mengetahui seberapa baik Pengawasan/Pengendalian terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

5.2.1 Menetapkan Standar

Menetapkan Standar yang mana mencangkup standar dalam hal ini kriteria sederhana tentang penilaian kinerja yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Adanya sejumlah hal dari seluruh perencanaan program dimana kinerja dapat diukur melalui kejelasan dokumen perencanaan operasional pabrik sagu, dan kejelasan peraturan berkaitan lingkungan hidup tentang pabrik sagu dari sejumlah ketentuan aturan yang berlaku telah dijadikan standar. Kinerja ini

dilaksanakan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dibidang pengendalian dan pengawasan. Kebijakan pengelolaan limbah yang ada saat ini masih diselenggarakan secara parsial oleh berbagai instansi terkait, sehingga dalam penerapannya masih banyak menemukan kendala. Di samping itu, pengelolaan limbah belum dilakukan dalam bentuk pengaturan yang terpadu sementara limbah dapat menimbulkan kerugian terhadap pendapatan hasil masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, dan lingkungan hidup apabila tidak dilakukan pengelolaan dengan benar. Oleh karena itu, maka semakin disadari perlunya Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah yang secara terpadu mengatur kegiatan produksi. Pentingnya penyusunan Peraturan Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Sehubungan dengan hal ini Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal ini dapat dilihat suatu indikator yaitu mengenai Menetapkan Standar apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.6 : Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Menetapkan Standar terhadap (Pegawai Dinas Lingkungan Hidup).

No.	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Setuju	Cukup Setuju	Kurang Setuju	

No.	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Setuju	Cukup Setuju	Kurang Setuju	
1.	Kejelasan dokumen perencanaan operasional pabrik sagu	5 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	5 (100%)
2.	Kejelasan peraturan berkaitan lingkungan hidup tentang pabrik sagu	4 (80%)	1 (20%)	0 (0%)	5 (100%)
3.	Ketentuan aturan yang berlaku telah dijadikan standar	5 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	5 (100%)
Jumlah		14	1	0	15
Rata-rata		5	0	0	5
Persentase		100 %	0%	0%	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2020

Dari tabel 5.6 diatas dapat dilihat bahwa dari 5 responden untuk item yang dinilai tentang indikator Menetapkan Standar pada kategori “Setuju” sebanyak 5 orang atau sama dengan 100%, sedangkan untuk kategori penilaian “Cukup Setuju” 0 atau sama dengan 0%, dan untuk kategori penilaian “Kurang Setuju” 0 atau sama dengan 0%.

Dari urai diatas dapat disimpulkan bahwa indikator Menetapkan Standar berada pada kategori “Setuju” berdasarkan jawaban dari *key informan*, selain itu perlu juga dilihat seberapa besar persentase dari jawaban karyawan pabrik sagu dan masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik sagu untuk indikator Menetapkan Standar seperti uraian dibawah.

Tabel 5.7 : Distribusi Tanggapan Informan Karyawan Pabrik Sagu Mengenai Indikator Menetapkan Standar terhadap (Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti).

No.	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Setuju	Cukup Setuju	Kurang Setuju	
1.	Kejelasan dokumen perencanaan operasional pabrik sagu	8 (57%)	4 (29%)	2 (14%)	14 (100%)
2.	Kejelasan peraturan berkaitan lingkungan hidup tentang pabrik sagu	11 (79%)	3 (21%)	0 (0%)	14 (100%)
3.	Ketentuan aturan yang berlaku telah dijadikan standar	9 (64%)	5 (36%)	0 (0%)	14 (100%)
Jumlah		28	12	2	42
Rata-rata		9	4	1	14
Persentase		64 %	29 %	7 %	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2020

Dari tabel 5.7 diatas dapat dilihat bahwa dari 14 responden untuk item yang dinilai tentang indikator Menetapkan Standar pada kategori “Setuju” sebanyak 9 orang atau sama dengan 64%, sedangkan untuk kategori penilaian “Cukup Setuju” 4 orang atau sama dengan 29%, dan untuk kategori penilaian “Kurang Setuju” 1 orang atau sama dengan 7%.

Tabel 5.8 : Distribusi Tanggapan Informan Masyarakat Yang Tinggal di Sekitar Pabrik Sagu Mengenai Indikator Menetapkan Standar terhadap (Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti).

No.	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Setuju	Cukup Setuju	Kurang Setuju	
1.	Kejelasan dokumen perencanaan operasional pabrik sagu	3 (30%)	2 (20%)	5 (50%)	10 (100%)
2.	Kejelasan peraturan berkaitan lingkungan hidup tentang pabrik sagu	0 (0%)	0 (0%)	10 (100%)	10 (100%)
3.	Ketentuan aturan yang berlaku telah dijadikan standar	0 (0%)	1 (10%)	9 (90%)	10 (100%)
Jumlah		3	3	24	30
Rata-rata		1	1	8	10
Persentase		10 %	10%	80 %	100%

Sumber : Data Oalahan Hasil Penelitian Tahun 2020

Dari tabel 5.8 diatas dapat dilihat bahwa dari 10 responden untuk item yang dinilai tentang indikator Menetapkan Standar pada kategori “Setuju” sebanyak 1 orang atau sama dengan 10%, sedangkan untuk kategori penilaian “Cukup Setuju” 1 orang atau sama dengan 10%, dan untuk kategori penilaian “Kurang Setuju” 8 orang atau sama dengan 80%.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan melalui penelitian dengan penyebaran kuisisioner yang dilakukan terhadap responden Pegawai Dinas (*key informan*), Karyawan Pabrik Sagu, dan juga Masyarakat Yang Tinggal di Sekitar Pabrik Sagu. Maka penulis akan meyajikan wawancara kepada informan

terkait Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Adapun hasil wawancara dengan 3 orang *key informan* yaitu, adalah sebagai berikut : berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Bapak Drs. Said Asmaruddin, MM.) mengenai indikator Menetapkan Standar beliau menjelaskan bahwa :

“hmm... pada umumnya untuk kejelasan mengenai Menetapan Standar pihak-pihak pabrik sagu dan karyawan pabrik sagu sudah mengerti tentang pengelolaan limbah, namun yang sudah banyak mengerti dan mengetahuinya yaitu pabrik/kilang sagu yang sudah lama berdiri. Sedangkan pabrik/kilang sagu yang baru, sedikit dari mereka yang paham akan peraturan pengelolaan limbah sagu” (wawancara : selasa 17 Desember 2019, Pukul 09:21 wib)

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Bapak Khairul S.AP) mengenai indikator Menetapkan Standar beliau menjelaskan bahwa :

“sama seperti penjelasan wawancara oleh Kepala Dinas diatas Kepala Bidang juga menyatakan bahwa pengelolaan tentang limbah pabrik/kilang sagu, pabrik yang sudah lama berdiri sangat mengetahui tentang peraturan tersebut, berbeda dengan pabrik-pabrik yang baru berdiri mereka kebanyakan kurang tahu atau kurang paham tentang peraturan pengelolaan limbah sagu”(wawancara : selasa 17 Desember 2019, Pukul 14:15 wib)

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Bapak Syahrul S.AP) mengenai indikator Menetapkan Standar, beliau menjelaskan bahwa :

“kebanyakan untuk pabrik/kilang sagu yang sudah lama berdiri mereka sudah memahami tentang pengelolaan limbah sagu sebelum dibuang kesungai tetapi pabrik/kilang sagu yang baru berdiri ada yang memahami tentang pengelolaan limbah sagu namun ada juga sebagian dari mereka

yang tidak memahami tentang pengelolaan limbah sagu dan langsung membunagnya kesungai” (wawancara : Selasa 17 Desember 2019, Pukul 16:10 wib).

Selain wawancara yang penulis lakukan kepada *key informan*, penulis juga melakukan wawancara kepada beberapa Masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik/kilang sagu. Adapun hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat adalah sebagai berikut :

Berdasarkan wawancara dengan orang yang dituakan didesa maini Kecamatan Tebing Tinggi (Bapak Ramlan), beliau menjelaskan bahwa :

“baiklah terimakasih nak, mengenai masalah dari pabrik/kilang sagu bapak kurang memahami terhadap ketentuan aturan pengelolaan limbah maupun standar atau tolak ukur pengawasan limbah pabrik sagu, karena aturan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk pabrik sagu tidak bisa kami ikut campur dalam hal kerjanya tersebut nak, mungkin hanya itu yang bapak ketahui”. (wawancara : Kamis 19 Desember 2019, Pukul 09:35 wib).

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Bapak Yanto, beliau menjelaskan bahwa :

“mengenai ketentuan aturan tentang pengelolaan limbah pabrik sagu bapak sendiri kurang memahami dari isi-isi aturan tersebut, tapi yang pasti bapak tahu, bawasannya pabrik itu tidak boleh membuang limbah secara langsung kesungai yang melainkan harus ada pemantauan dahulu dari Dinas Lingkungan Hidup, hanya itulah yang bapak ketahui nak”. (wawancara : Kamis 19 Desember 2019, Pukul 10:20 wib).

Dari hasil wawancara diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa dari indikator Menetapkan Standar sudah “Setuju”. Pertama, mengenai standar atau tolak ukur dari pengawasan limbah pabrik sagu sudah cukup jelas dan sudah dipatuhi oleh pabrik sagu yang lama berdiri, namun ada juga beberapa pabrik sagu yang kurang memahami peraturan dikarenakan mereka pabrik-pabrik yang belum lama berdiri, oleh sebab itu mereka kurang memahami peraturan yang telah dibuat

oleh DLH tentang pengelolaan limbah. Kedua, dari lokasi pabrik sagu ada beberapa pabrik sagu yang letak lokasinya jauh dari Kota Selatpanjang, dimana sulit bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengendalian atau pengawasan pengelolaan limbah secara tepat waktu seperti yang telah ditetapkan dalam tolak ukur standar pengawasan, dikarenakan jalan untuk menuju ke pabrik sagu tersebut sangat sulit ditempuh dan memakan waktu yang lama.

Kemudian berdasarkan observasi peneliti dilapangan mengenai indikator Menetapkan Standar juga sudah “Setuju”. Hal ini terlihat dalam Menetapkan Standar oleh Dinas Lingkungan Hidup mempunyai dokumen perencanaan standar yang menjadi tolak ukur untuk pengawasan/pengendalian limbah terhadap pabrik-pabrik sagu dan mereka juga menjelaskan peraturan yang berkaitan tentang pengelolaan limbah demi menjaga baik kelestarian lingkungan hidup bersama.

Berdasarkan analisis peneliti, dalam menetapkan standar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti sudah melakukan sosialisasi yang baik dengan perusahaan dan karyawan yang ada dipabrik sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Mengenai standar aturan pengelolaan limbah dan tata cara pengelolaan limbah yang baik agar tidak membahayakan lingkungan dan masyarakat sekitar.

Adapun sikap ilmiah peneliti dari Teori Proses Pengawasan menurut Weihrich Koontz (dalam Dr. Nur Aedi, M.Pd 2014;89) “Menetapkan Standar langkah pertama dalam kegiatan pengawasan adalah menetapkan rencana. Berdasarkan rencana yang kompleks dan detail yang telah ditetapkan kemudian

disusunlah standar-standar khusus yang ditetapkan. Yang dimaksud dengan standar adalah kriteria sederhana tentang kinerja”.

5.2.2 Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Evaluasi pelaksanaan pengawasan merupakan suatu penilaian dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh seksi pencemaran dan kerusakan lingkungan, seksi penegakan hukum lingkungan hidup serta seksi perencanaan dan kajian dampak lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sehubungan dengan tingkat Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal ini juga harus dilihat suatu indikator yang mengenai Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan yang akan membawa peneliti dapat melihat lebih jauh apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum, maka hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.9 : Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan terhadap (Pegawai Dinas Lingkungan Hidup).

No.	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Setuju	Cukup Setuju	Kurang Setuju	
1.	Inspeksi/pemeriksaan rutin atau khusus.	4 (80%)	1 (20%)	0 (0%)	5 (100%)
2.	Inspeksi Mendadak (Sidak).	4 (80%)	1 (20%)	0 (0%)	5 (100%)

No.	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Setuju	Cukup Setuju	Kurang Setuju	
3.	Adanya kegiatan membandingkan upaya pelaksanaan terhadap rencana penanggulangan limbah	4 (80%)	1 (20%)	0 (0%)	5 (100%)
Jumlah		12	3	0	15
Rata-rata		4	1	0	5
Persentase		80%	20 %	0%	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2020

Dari tabel 5.9 diatas dapat dilihat bahwa dari 5 responden untuk item yang dinilai tentang indikator Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan pada kategori “Setuju” sebanyak 4 orang atau sama dengan 80%, sedangkan untuk kategori penilaian “Cukup Setuju” 1 orang atau sama dengan 20%, dan untuk kategori penilaian “Kurang Setuju” 0 atau sama dengan 0%.

Tabel 5.10 : Distribusi Tanggapan Informan Karyawan Pabrik Sagu Mengenai Indikator Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan terhadap (Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti).

No.	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Setuju	Cukup Setuju	Kurang Setuju	
1.	Inspeksi/pemeriksaan rutin atau khusus.	11 (79%)	3 (21%)	0	14 (100%)
2.	Inspeksi Mendadak (Sidak).	14 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	14 (100%)
3.	Adanya kegiatan membandingkan upaya pelaksanaan terhadap rencana	5 (36%)	4 (28%)	5 (36%)	14 (100%)

	penanggulangan limbah				
	Jumlah	30	7	5	42
	Rata-rata	10	2	2	14
	Persentase	72 %	14 %	14 %	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2020

Dari tabel 5.10 diatas dapat dilihat bahwa dari 14 responden untuk item yang dinilai tentang indikator Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan pada kategori “Setuju” sebanyak 10 orang atau sama dengan 72%, sedangkan untuk kategori penilaian “Cukup Setuju” 2 orang atau sama dengan 14%, dan untuk kategori penilaian “Kurang Setuju” 2 orang atau sama dengan 14%.

Tabel 5.11 : Distribusi Tanggapan Informan Masyarakat Yang Tinggal di Sekitar Pabrik Sagu Mengenai Indikator Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan terhadap (Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti).

No.	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Setuju	Cukup Setuju	Kurang Setuju	
1.	Inspeksi/pemeriksaan rutin atau khusus.	2 (20%)	5 (50%)	3 (30%)	10 (100%)
2.	Inspeksi Mendadak (Sidak).	5 (50%)	3 (30%)	2 (20%)	10 (100%)
3.	Adanya kegiatan membandingkan upaya pelaksanaan terhadap rencana penanggulangan limbah	0 (0%)	1 (10%)	9 (90%)	10 (100%)
	Jumlah	7	9	14	30
	Rata-rata	2	3	5	10
	Persentase	20 %	30 %	50 %	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2020

Dari tabel 5.11 diatas dapat dilihat bahwa dari 10 responden untuk item yang dinilai tentang indikator Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan pada kategori “Setuju” sebanyak 2 orang atau sama dengan 20%, sedangkan untuk kategori penilaian “Cukup Setuju” 3 orang atau sama dengan 30%, dan untuk kategori penilaian “Kurang Setuju” 5 orang atau sama dengan 50%.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan melalui penelitian dengan penyebaran kuisioner yang dilakukan terhadap responden Pegawai Dinas (*key informan*), Karyawan Pabrik Sagu, dan juga Masyarakat Yang Tinggal di Sekitar Pabrik Sagu. Maka penulis akan menyajikan wawancara kepada informan terkait Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Adapun hasil wawancara dengan 3 orang *key informan* yaitu, adalah sebagai berikut : berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Bapak Drs. Said Asmaruddin, MM.) mengenai indikator Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan beliau menjelaskan bahwa :

“terimakasih sebelumnya baik nak, untuk hal ini kami selalu melakukan pemeriksaan rutin tentang pengelolaan limbah sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada pabrik-pabrik sagu di kecamatan Tebing Tinggi. Kami juga nak terkadang melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pabrik sagu, supaya kami tahu bagaimana pabrik sagu itu mengelola limbah, apakah limbah tersebut diolah atau dibuang secara langsung, kalau kami datang sesuai jadwal terkadang mereka baik, ibaratnya baik di depan kalau dibelakang siapa yang tahu, begitu nak. Dan untuk perencanaan dann pelaksanaan kami selalu melakukan perencanaan terlebih dahulu untuk melakukan pelaksanaan sesuai dengan tanggal dan waktu pemeriksaan yang sudah ditentukan” (wawancara : selasa 17 Desember 2019, Pukul 09:28 wib)

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Bapak Khairul S.AP) mengenai indikator Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan beliau menjelaskan bahwa :

“terimakasih atas pertanyaannya, baik sufriyandi menurut Bapak untuk pemeriksaan rutin ke pabrik sagu tentang pengelolaan limbah, kami selalu datang tepat sesuai tanggal pemeriksaan, terkadang kami juga melakukan sidak (inspeksi mendadak) kepada pabrik-pabrik sagu, tetapi ada juga pabrik sagu yang kami periksa lewat dari tanggal yang ditetapkan, karena pabrik sagu tadi itu lokasinya jauh, medan tempuhnya sulit dan memakan waktu yang cukup lama,”(wawancara : Selasa 17 Desember 2019, Pukul 14:20 wib)

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Bapak Syahrul S.AP) mengenai indikator Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan, beliau menjelaskan bahwa :

“Seperti yang sudah dijelaskan Kepala Dinas dan Kepala Bidang, Kepala Seksi juga mengatakan bahwa untuk pemeriksaan rutin terhadap pabrik-pabrik sagu yang ada di Tebing Tinggi di laksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ada, menurut abang terhadap sidak pun juga dilakukan dengan pemilihan tanggal secara acak untuk mengetahui bagaimana pengelolaan limbah dilakukan bila tidak ada pengawasan dari dinas, jadi untuk perencanaan dan pelaksanaan yang abang tau pelaksanaan pengendalian/pengawasan sudah dilakukan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan bersama” (wawancara : Selasa 17 Desember 2019, Pukul 16:25 wib).

Selain wawancara yang penulis lakukan kepada *key informan*, penulis juga melakukan wawancara kepada beberapa Masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik/kilang sagu. Adapun hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat adalah sebagai berikut :

Berdasarkan wawancara dengan orang yang dituakan didesa maini Kecamatan Tebing Tinggi (Bapak Ramlan), beliau menjelaskan bahwa :

“ehehe... bapak terus terang iyan, mengenai masalah antara dinas dan pabrik sagu jujur saja bapak kurang paham dan tak terlibat dengan hal/urusan mereka tersebut, tetapi kalau yang bapak lihat dari Dinas Lingkungan Hidup terhadap pemeriksaan pabrik sagu dalam pengelolaan limbah mereka itu datang, ditanggal yang sama setiap bulannya. Dan kalau untuk sidak dan perencanaan dari mereka bapak tidak pernah tahu menau sama sekali”. (wawancara : Kamis 19 Desember 2019, Pukul 09:45 wib).

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Bapak Yanto, beliau menjelaskan bahwa :

“kalau untuk masalah dinas terhadap pabrik ini bapak kurang paham dan tak ngerti apa yang dibuat oleh dinas tersebut, karena bapak juga jarang dirumah dari pagi sampai sore, karena bapak juga kerja jauh dari rumah untuk mengetahui hal ini pun bapak tak kuasa sangat nak”. (wawancara : Kamis 19 Desember 2019, Pukul 10:35 wib)

Dari hasil wawancara diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa dari indikator Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan sudah “Setuju”. Pertama, didalam proses pengawasan/pengendalian limbah sagu ini sudah dilakukan pengawasan atau evaluasi terhadap perbaikan kilang sagu dalam pengelolaan limbah demi kebaikan lingkungan hidup dan berdampak baik bagi masyarakat tanpa merugikan, kemudian yang Kedua dari Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa mereka telah melakukan evaluasi pelaksanaan pengawasan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati bersama.

Kemudian berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan mengenai indikator Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan juga sudah “Setuju”. Pertama, Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan pemeriksaan rutin terhadap pabrik sagu dalam pengelolaan limbah sesuai dengan tanggal dan waktu yang telah ditetapkan, dan yang Kedua, mereka juga telah melakukan sidak dengan pemilihan tanggal secara acak untuk mengetahui pabrik-pabrik mana yang masih melakukan

kesalahan pembuangan limbah tanpa melakukan pengelolaan terlebih dahulu yang mana hal tersebut dapat membahayakan ekosistem alam.

Berdasarkan analisis peneliti, dalam Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti sudah melakukan evaluasi terhadap pabrik-pabrik sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti, serta pelaksanaannya juga sudah sesuai dengan tanggal dan waktu yang telah ditetapkan.

Adapun sikap ilmiah peneliti dari Teori Proses Pengawasan menurut Wehrich Koontz (dalam Dr. Nur Aedi, M.Pd 2014:89) “Mengukur Kinerja meskipun banyak pengukuran atau alat ukur yang tidak selalu dapat diterapkan, tetapi pengukuran kinerja dibandingkan dengan standar idealnya dapat dilakukan. Atau setidaknya pengukuran untuk mengetahui atau mendeteksi lebih dini bila terjadi deviasi dan dihindari dengan tindakan yang tepat”.

5.2.3 Pelaporan

Pelaporan berasal dari kata laporan yang berarti suatu cara komunikasi di mana penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepada nya (Keraf, 2001:284).

Sehubungan dengan ini mengenai hasil tanggapan responden tentang indikator Pelaporan dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum, maka hal ini dapat dilihat pada tabel bawah ini:

Tabel 5.12 : Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Pelaporan terhadap (Pegawai Dinas Lingkungan Hidup).

No.	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Setuju	Cukup Setuju	Kurang Setuju	
1.	Adanya laporan tertulis dari hasil infeksi ke lapangan	5 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	5 (100%)
2.	Adanya laporan lisan dari petugas lapangan	3 (60%)	2 (40%)	0 (0%)	5 (100%)
Jumlah		8	2	0	10
Rata-rata		4	1	0	5
Persentase		80 %	20 %	0 %	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2020

Dari tabel 5.12 diatas dapat dilihat bahwa dari 5 responden untuk item yang dinilai tentang indikator Pelaporan pada kategori “Setuju” sebanyak 4 orang atau sama dengan 80%, sedangkan untuk kategori penilaian “Cukup Setuju” 1 orang atau sama dengan 20%, dan untuk kategori penilaian “Kurang Setuju” 0 atau sama dengan 0%.

Tabel 5.13 : Distribusi Tanggapan Informan Karyawan Pabrik Sagu Mengenai Indikator Pelaporan terhadap (Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti).

No.	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Setuju	Cukup Setuju	Kurang Setuju	
1.	Adanya laporan tertulis dari hasil infeksi ke lapangan	3 (21%)	6 (43%)	5 (36%)	14 (100%)

No.	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Setuju	Cukup Setuju	Kurang Setuju	
2.	Adanya laporan lisan dari petugas lapangan	2 (14%)	8 (57%)	4 (29%)	14 (100%)
	Jumlah	5	14	9	28
	Rata-rata	2	7	5	14
	Persentase	14 %	50%	36%	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2020

Dari tabel 5.13 diatas dapat dilihat bahwa dari 14 responden untuk item yang dinilai tentang indikator Pelaporan pada kategori “Setuju” sebanyak 2 orang atau sama dengan 14%, sedangkan untuk kategori penilaian “Cukup Setuju” 7 orang atau sama dengan 50%, dan untuk kategori penilaian “Kurang Setuju” 5 orang atau sama dengan 36%.

Tabel 5.14 : Distribusi Tanggapan Informan Masyarakat Yang Tinggal di Sekitar Pabrik Sagu Mengenai Indikator Pelaporan terhadap (Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti).

No.	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Setuju	Cukup Setuju	Kurang Setuju	
1.	Adanya laporan tertulis dari hasil infeksi ke lapangan	0 (0%)	0 (0%)	10 (100%)	10 (100%)
2.	Adanya laporan lisan dari petugas lapangan	0 (0%)	0 (0%)	10 (100%)	10 (100%)
	Jumlah	0	0	20	20
	Rata-rata	0	0	10	10
	Persentase	0%	0%	100%	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Peneltian Tahun 2020

Dari tabel 5.14 diatas dapat dilihat bahwa dari 10 responden untuk item yang dinilai tentang indikator Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan pada kategori “Setuju” sebanyak 0 atau sama dengan 0%, sedangkan untuk kategori penilaian “Cukup Setuju” 0 atau sama dengan 0%, dan untuk kategori penilaian “Kurang Setuju” 10 orang atau sama dengan 100%.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan melalui penelitian dengan penyebaran kuisioner yang dilakukan terhadap responden Pegawai Dinas (*key informan*), Karyawan Pabrik Sagu, dan juga Masyarakat Yang Tinggal di Sekitar Pabrik Sagu. Maka penulis akan menyajikan wawancara kepada informan terkait Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Adapun hasil wawancara dengan 3 orang *key informan* yaitu, adalah sebagai berikut : berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Bapak Drs. Said Asmaruddin, MM.) mengenai indikator Pelaporan beliau menjelaskan bahwa :

“terimakasih nak atas pertanyaannya, baik, atas apa yang bapak ketahui dari tugas seksi pengendalian dan pengeawasan, mereka sudah membuat laporan tertulis terkait hasil dari infeksi atau pengawasan limbah kelapangan. Dan yang kedua, ada juga laporan lisan dari petugas lapangan pengawasan pabrik sagu terhadap pengelolaan limbah secara langsung kelapangan dari hasil yang dilihat sewaktu waktu itu juga. Dimana jika pabrik sagu melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah. (wawancara : selasa 17 Desember 2019, Pukul 09:40 wib)

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Bapak Khairul S.AP) mengenai indikator Pelaporan beliau menjelaskan bahwa :

“Pelaporan tertulis dari hasil infeksi kelapangan ini merupakan tugas dari seksi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, untuk hal ini menurut bapak mereka sudah membuat laporan tertulis terkait hasil infeksi dan pengawasan pabrik sagu dalam pengelolaan limbah”. (wawancara : selasa 17 Desember 2019, Pukul 14:33 wib)

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Bapak Syahrul S.AP) mengenai indikator Pelaporan, beliau menjelaskan bahwa :

“terimakasih iyan atas pertanyaannya, baiklah disini abang akan menjelaskan mengenai pertanyaan iyan dimana hasil laporan infeksi dan pengawasan pabrik sagu terhadap pengelolaan limbah merupakan tugas abang sendiri selaku kepala seksi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selain dari hasil infeksi dan pengawasan terhadap pabrik sagu dalam pengelolaan limbah ada juga laporan lisan dari petugas pengawasan pabrik sagu terhadap pengelolaan limbah kelapangan yang mana laporan tersebut juga bakalan kami tulis dijadikan dokumen yang kemudian akan kami serahkan kepala bidang. (wawancara : Selasa 17 Desember 2019, Pukul 16:35 wib).

Selain wawancara yang penulis lakukan kepada *key informan*, penulis juga melakukan wawancara kepada beberapa Masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik/kilang sagu. Adapun hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat adalah sebagai berikut :

Bedasarkan wawancara dengan orang yang dituakan didesa maini Kecamatan Tebing Tinggi (Bapak Ramlan), beliau menjelaskan bahwa :

“aduuhh.. nak, hal-hal semacam ini sama bapak tak begitu tau karena itukan merupakan tugas dinas, kalau pun ada laporan dari masyarakat terhadap dinas terkait pabrik sagu yang membuang limbah kesuangai

secara langsung. Alhamdulillah dinas dengan sigapnya langsung menanggapi dan langsung turun kelapangan untuk menangani hal tersebut, mungkin itulah yang bapak tau nak". (wawancara : kamis 19 Desember 2019, Pukul 10:00 wib).

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Bapak Yanto, beliau menjelaskan bahwa :

"kalau untuk masalah dinas terhadap pabrik sagu hal ini bapak jujur kurang paham dan tak tau sama sekali apa yang dibuat oleh dinas tersebut, karena apa lagi anak tanya masalah pelaporan sedangkan hasil pelaporan itu dipernah dipublikasikan ke masyarakat sekitar sini, menurut bapak sih itu hanya khusus dokumen untuk dinas". (wawancara : Kamis 19 Desember 2019, Pukul 10:40 wib).

Dari hasil tabel distribusi diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa dari indikator Pelaporan banyak dari masyarakat menyatakan "Tidak Setuju", karena mereka tidak tahu/mengerti mengenai laporan terkait pengawasan pabrik sagu terhadap pengelolaan limbah. Tetapi jika dilihat dari hasil wawancara dapat ditarik hasil kesimpulan diatas bahwa bisa dikatakan sudah "Setuju". Pertama, dinas melakukan penulisan laporan setelah adanya pengawasan dan infeksi terhadap pabrik sagu terkait pengelolaan limbah. Kedua, penulisan laporan juga dilakukan setelah adanya laporan lisan dari petugas lapangan pengawasan pabrik sagu terhadap pengelolaan limbah secara langsung kelapangan, yang kemudian hasil dari laporan tertulis tersebut diserahkan kepada atas untuk ditindak lanjuti hasilnya.

Kemudian berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan mengenai indikator Pelaporan juga sudah "Setuju". Pertama, Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan penulisan pelaporan terkait pengawasan dan sidak terhadap pengelolaan limbah pabrik sagu. Kedua, selain melakukan hasil penulisan laporan dan sidak mereka juga membuat/menulis hasil laporan lisan dari petugas lapangan

pengawasan pabrik sagu terhadap pengelolaan limbah secara langsung di lapangan.

Berdasarkan analisis peneliti, dalam Pelaporan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti sudah melakukan pelaporan atau menuliskan laporan terkait hal-hal pengawasan pengelolaan limbah pada pabrik-pabrik sagu di Kecamatan Tebing Tibggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Adapun sikap ilmiah peneliti dari Teori Sondang P. Siagian (dalam Prof. Dr. H. Wirman Syarif, M.Si, 2012;9) “Administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Jadi untuk mencapai suatu tujuan Masyarakat sangat berperan penting yang merupakan salah satu indikator penentu tingkat keberhasilan sebuah kebijakan di dalam suatu pemerintahan. Berhasil atau tidaknya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah didukung oleh peran penting dari masyarakat itu sendiri. Dalam pelaksanaan Fungsi Pengawasan Limbah Industri Sagu yang diterapkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti peran masyarakat diharapkan mampu memberi informasi dan kerja sama yang besar bagi keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

5.2.4 Mengambil Tindakan Perbaikan

Mengambil tindakan perbaikan merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan indikator yang telah dijelaskan diatas tadi, jika masih ditemukan adanya pabrik sagu yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup

terhadap Larangan membuang limbah langsung kesungai demi keamanan dan faktor lain yang berkaitan dengan standar yang berlaku. Dalam hal ini manakala masih ditemukan pabrik sagu yang tidak taat pada aturan terhadap pengelolaan limbah maka akan diberikan tindakan perbaikan berupa peringatan dan sanksi-sanksi lainnya.

Sehubungan dengan hal ini hasil dari indikator Mengambil Tindakan Perbaikan yang mengenai dengan judul penelitian yaitu Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti maka apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum, maka hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.15 : Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Mengambil Tindakan Perbaikan terhadap (Pegawai Dinas Lingkungan Hidup).

No.	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Setuju	Cukup Setuju	Kurang Setuju	
1.	Menemukan dan mencegah jika ada penyimpangan pembuangan limbah	4 (80%)	1 (20%)	0 (0%)	5 (100%)
2.	Memberikan Sanksi peringatan tertulis.	5 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	5 (100%)
3.	Melakukan Sanksi pencabutan surat izin usaha sagu.	2 (40%)	2 (40%)	1 (20%)	5 (100%)
Jumlah		11	3	1	15
Rata-rata		4	1	0	5
Persentase		80%	20%	0%	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2020

Dari tabel 5.15 diatas dapat dilihat bahwa dari 5 responden untuk item yang dinilai tentang indikator Mengambil Tindakan Perbaikan pada kategori “Setuju” sebanyak 4 orang atau sama dengan 80%, sedangkan untuk kategori penilaian “Cukup Setuju” 1 orang atau sama dengan 20%, dan untuk kategori penilaian “Kurang Setuju” 0 atau sama dengan 0%.

Tabel 5.16 : Distribusi Tanggapan Informan Karyawan Pabrik Sagu Mengenai Indikator Mengambil Tindakan Perbaikan terhadap (Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti).

No.	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Setuju	Cukup Setuju	Kurang Setuju	
1.	Menemukan dan mencegah jika ada penyimpangan pembuangan limbah	14 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	14 (100%)
2.	Memberikan Sanksi peringatan tertulis.	12 (86%)	2 (14%)	0 (0%)	14 (100%)
3.	Melakukan Sanksi pencabutan surat izin usaha sagu.	2 (14%)	2 (14%)	10 (72%)	14 (100%)
Jumlah		28	4	10	42
Rata-rata		10	1	3	14
Persentase		72%	7%	21%	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2020

Dari tabel 5.16 diatas dapat dilihat bahwa dari 14 responden untuk item yang dinilai tentang indikator Mengambil Tindakan Perbaikan pada kategori “Setuju” sebanyak 10 orang atau sama dengan 72%, sedangkan untuk kategori

penilaian “Cukup Setuju” 1 orang atau sama dengan 7%, dan untuk kategori penilaian “Kurang Setuju” 3 orang atau sama dengan 21%.

Tabel 5.17 : Distribusi Tanggapan Informan Masyarakat Yang tinggal di Sekitar Pabrik Sagu Mengenai Indikator Mengambil Tindakan Perbaikan terhadap (Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti).

No.	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Setuju	Cukup Setuju	Kurang Setuju	
1.	Menemukan dan mencegah jika ada penyimpangan pembuangan limbah	1 (10%)	1 (10%)	8 (80%)	10 (100%)
2.	Memberikan Sanksi peringatan tertulis.	5 (50%)	1 (10%)	4 (40%)	10 (100%)
3.	Melakukan Sanksi pencabutan surat izin usaha sagu.	1 (10%)	3 (30%)	6 (60%)	10 (100%)
Jumlah		7	5	18	30
Rata-rata		2	2	6	10
Persentase		20 %	20 %	60 %	%

Sumber : Data Olahan Hasil Peneliti Tahun 2020

Dari tabel 5.17 diatas dapat dilihat bahwa dari 10 responden untuk item yang dinilai tentang indikator Mengambil Tindakan Perbaikan pada kategori “Setuju” sebanyak 2 orang atau sama dengan 20%, sedangkan untuk kategori penilaian “Cukup Setuju” 2 orang atau sama dengan 20%, dan untuk kategori penilaian “Kurang Setuju” 6 orang atau sama dengan 60%.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan melalui penelitian dengan penyebaran kuisioner yang dilakukan terhadap responden Pegawai Dinas

(*key informan*), Karyawan Pabrik Sagu, dan juga Masyarakat Yang Tinggal di Sekitar Pabrik Sagu. Maka penulis akan meyajikan wawancara kepada informan terkait Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Adapun hasil wawancara dengan 3 orang *key informan* yaitu, adalah sebagai berikut : berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Bapak Drs. Said Asmaruddin, MM.) mengenai indikator Mengambil Tindakan Perbaikan beliau menjelaskan bahwa :

“mmm.. begini nak, kami selaku dinas lingkungan hidup selalu memberi himbauan dan melakukan pencegahan agar pabrik-pabrik sagu tidak membuang limbah secara langsung kesungai, karena hal tersebut dapat membahayakan lingkungan sekitar, tapi kalau ada pabrik sagu yang melakukan penyimpangan pembuangan limbah secara langsung kami selaku pihak dinas akan memberikan sanksi peringatan tertulis kepada pabrik yang melakukan pelanggaran/penyimpangan untuk pertama kali dan jika pabrik sagu sudah berkali-kali melakukan pelanggaran kami tidak bisa memberikan sanksi pencabutan surat izin usaha sagu secara langsung. Karena kami tidak ada kewenangan untuk hal itu, tetapi sekarang sudah direncanakan adanya pelimpahan wewenang secara langsung dari bupati kepada dinas untuk pencabutan surat izin usaha sagu kepada pabrik sagu yang melakukan pelanggaran berkali-kali. (wawancara : selasa 17 Desember 2019, Pukul 09:47 wib)

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Bapak Khairul S.AP) mengenai indikator Mengambil Tindakan Perbaikan beliau menjelaskan bahwa :

“ok, terimakasih atas pertanyaannya, dapat bapak jelaskan jadi begini iyan bagi pabrik sagu yang melakukan pelanggaran pertama kali terkait pembuangan limbah secara langsung kesungai, kami hanya akan memberikan sanksi berupa surat peringatan tertulis. Tapi jika pabrik sagu tersebut sudah melakukan pelanggaran berkali kali kami akan melaporkannya kepada kepada dinas yang akan diteruskan kepada kepala daerah yaitu bupati untuk menindak lanjuti terkait sanksi yang akan

diberikan kepada pabrik sagu yang melakukan pelanggaran tersebut”.
(wawancara : selasa 17 Desember 2019, Pukul 14:45 wib)

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Bapak Syahrul S.AP) mengenai indikator Mengambil Tindakan Perbaikan, beliau menjelaskan bahwa :

“seperti yang dijelaskan oleh kepala dinas dan kepala bidang, abang syahrul juga menjelaskan bahwa pabrik yang melakukan pelanggaran untuk pertama kali hanya akan diberikan sanksi yaitu berupa surat peringatan tertulis. Tapi jika pabrik tersebut melakukan pelanggaran berkali kali meskipun sudah di ingatkan maka dinas akan melaporkan hal tersebut kepada kepala daerah atau bupati supaya ditinjakanjuti untuk pemberian sanksinya”.(wawancara : Selasa 17 Desember 2019, Pukul 16:45 wib).

Selain wawancara yang penulis lakukan kepada *key informan*, penulis juga melakukan wawancara kepada beberapa Masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik/kilang sagu. Adapun hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat adalah sebagai berikut :

Berdasarkan wawancara dengan orang yang dituakan didesa maini Kecamatan Tebing Tinggi (Bapak Ramlan), beliau menjelaskan bahwa :

“untuk pertanyaan mengenai tindakan dinas kepada pabrik yang melakukan tindakan pelanggaran bapak sendiri tidak tau apa sanksi yang dinas berikan kepada pabrik sagu. Disini bapak hanya mengetahui/mendengar berita hanya dari cerita warga yang bekerja dipabrik sagu tersebut”. (wawancara : kamis 19 Desember 2019, Pukul 10:05 wib).

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Bapak Yanto, beliau menjelaskan bahwa :

“heemm... kalau untuk masalah sanksi mengenai pelanggaran pembuang limbah yang dilakukan pabrik sagu kami jujur asli tidak mengetahui begitu jelas sanksi apa yang diberikan oleh dinas terhadap pabrik. Tapi saya pernah melihat surat teguran yang ditempel oleh dinas lingkungan hidup disuatu pabrik sagu dan setelah saya dengar kabarnya ternyata itu

surat teguran pertama kepada pabrik karna pernah melakukan pelanggaran membuang limbah secara langsung kesungai”. (wawancara : Kamis 19 Desember 2019, Pukul 10:56 wib).

Dari hasil wawancara diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa dari indikator Mengambil Tindakan Perbaikan sudah “Setuju”. Pertama, didalam proses pengawasan/pengendalian limbah sagu terhadap pabrik sagu ketika suatu pabrik sagu melkukan pelanggaran untuk pertama kalinya maka Dinas akan memberikan surat teguran atau surat peringatan kepada pabrik dan yang. Kedua, jika suatu pabrik sagu sudah diingatkan dan diberi surat teguran tettapi masih juga melakukan pelanggaran terus menerus maka Dinas akan melaporkan hal tersebut kepada Kepala Daerah atau Bupati supaya ditindaklanjuti mengenai sanksi apa yang harus diberikan kepada pabrik sagu terkait pelanggaran yang sudah dilakukan berkali kali.

Kemudian berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan mengenai indikator Mengambil Tindakan Perbaikan juga sudah “Setuju”. Pertama, Dinas Lingkungan Hidup sudah memberikan sanksi kepada pabrik sagu yang melakukan pelanggaran terkait pembuangan limbah. Kedua, selain sanksi ada juga hokum yang mengatur terkait masalah pembunag limbah secara langsung kesungai yang dapat membahayakan lingkungan sekitar.

Berdasarkan analisis peneliti, dalam Mengambil Tindakan Perbaikan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti, sudah melakukan pengambilan tindakan perbaikan yaitu berupa sanksi surat teguran atau surat peringatan terkait hal-hal pelanggaran pengelolaan limbah yang dilakukan oleh pabrik sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepualaan Meranti.

Adapun sikap ilmiah peneliti dari Teori Proses Pengawasan menurut Wehrich Koontz (dalam Dr. Nur Aedi, M.Pd 2014;89) “Memperbaiki Penyimpangan perbaikan atas deviasi atau penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan atau program dapat dilakukan dengan mengambarkannya ulang rencana atau dengan memodifikasi tujuan. Atau kepada orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan tersebut dilakukan penjelasan tentang tanggung jawabnya sehingga dapat segera melakukan perbaikan dengan teknik yang tepat”.

Setelah pembahasan masing-masing indikator diatas untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah di Kecamatan Tinbing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Maka dilakukan rekapitulasi jawaban responden penelitian yang terdiri dari hasil jawaban dari *key informan* (Kepala Dinas, Kepala Bidang, dan Kepala seksi), Karyawan Pabrik Sagu dan Masyarakat yang tinggal di Sekitar Pabrik Sagu. Untuk lebih lengkapnya penulis akan paparkan dalam bentuk tabel berikut ini :

Tabel 5.18 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Pegawai Dinas Mengenai Seluruh Indikator Terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah di Kecamatan Tinbing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Setuju	Cukup Setuju	Kurang Setuju	
1	Menetapkan Standar	5 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	5 (100%)
2	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	4 (80%)	1 (20%)	0 (0%)	5 (100%)

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Setuju	Cukup Setuju	Kurang Setuju	
3	Pelaporan	4 (80%)	1 (20%)	0 (0%)	5 (100%)
4	Mengambil Tindakan Perbaikan	4 (80%)	1 (0%)	0 (0%)	5 (100%)
Jumlah		17	3	0	20
Rata-Rata		4	1	0	5
Persentase		80%	20%	0%	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan tabel 5.18 di atas maka dapat dijelaskan bahwa tanggapan seluruh responden pegawai Dinas Lingkungan Hidup yang menjadi sampel pada penelitian berdasarkan pendekatan-pendekatan indikator maka penulis dapat menyimpulkan bahwa hasil dari rekapitulasi keseluruhan yaitu yang menjawab pada kategori “Setuju” yaitu sebanyak 4 orang (80%), selanjutnya pegawai memberikan jawaban pada kategori “Cukup Setuju” yaitu sebanyak 1 orang (20%), dan yang memberikan jawaban kurang setuju 0 (0%).

Dari hasil rekapitulasi yang penulis dapatkan dari hasil penyebaran kuisisioner pada pegawai Dinas Lingkungan Hidup yang paling dominan adalah pada kategori “Setuju”, hal ini dikarenakan bahwa mereka sudah menilai selama melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan pada Dinas Lingkungan Hidup sudah cukup optimal dan cukup sesuai pelaksanaannya dilapangan dengan perencanaan atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Walaupun didalam pelaksanaan pengawasan masih ada beberapa kendala-kendala

sehingga pengawasan yang dilakukan terkadang tidak selalu berjalan dengan lancar dikarenakan lokasinya yang jauh, medan tempuhnya sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Tabel 5.19 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Karyawan Pabrik Sagu Mengenai Seluruh Indikator Terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah di Kecamatan Tinbing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Setuju	Cukup Setuju	Kurang Setuju	
1	Menetapkan Standar	9 (64%)	4 (29%)	1 (7%)	14 (100%)
2	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	10 (72%)	2 (14%)	2 (14%)	14 (100%)
3	Pelaporan	2 (14%)	7 (50%)	5 (36%)	14 (100%)
4	Mengambil Tindakan Perbaikan	10 (72%)	1 (7%)	3 (21%)	14 (21%)
Jumlah		31	14	11	56
Rata-Rata		7	4	3	14
Persentase		50%	29%	21%	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan tabel 5.19 di atas maka dapat dijelaskan bahwa tanggapan seluruh responden Karyawan Pabrik Sagu yang menjadi sampel pada penelitian berdasarkan pendekatan-pendekatan indikator maka penulis dapat menyimpulkan bahwa hasil dari rekapitulasi keseluruhan yaitu yang menjawab pada kategori “Setuju” yaitu sebanyak 7 orang (50%), selanjutnya Karyawan Pabrik Sagu

memberikan jawaban pada kategori “Cukup Setuju” yaitu sebanyak 4 orang (29%), dan yang memberikan jawaban kurang setuju sebanyak 3 orang (21%).

Dari hasil rekapitulasi yang penulis dapatkan dari hasil penyebaran kuisioner pada Karyawan Pabrik Sagu yang paling dominan adalah pada kategori “Setuju”, hal ini dikarenakan bahwa mereka menilai pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup sudah terlaksana tetapi hanya sebagian dari beberapa pabrik yang melaksanakan peraturan tersebut, dan ada juga sebagian pabrik yang masih melanggar aturan dengan membuang limbah secara langsung kesungai. Kemudian ada juga petugas dari Dinas yang datang mengawasi lewat dari tanggal pemeriksaan yang telah ditetapkan.

Tabel 5.20 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Yang Tinggal di Sekitar Pabrik Sagu Mengenai Seluruh Indikator Terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah di Kecamatan Tinbing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Setuju	Cukup Setuju	Kurang Setuju	
1	Menetapkan Standar	1 (10%)	1 (10%)	8 (80%)	10 (100%)
2	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	2 (20%)	3 (30%)	5 (50%)	10 (100%)
3	Pelaporan	0 (0%)	0 (0%)	10 (100%)	10 (100%)
4	Mengambil Tindakan Perbaikan	2 (20%)	2 (20%)	6 (60%)	10 (100%)
Jumlah		5	6	29	40
Rata-Rata		1	2	7	10
Persentase		10%	20%	70%	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2020

Dari tabel Berdasarkan tabel 5.20 di atas maka dapat dijelaskan bahwa tanggapan seluruh responden Masyarakat Yang Tinggal di Sekitar Pabrik Sagu yang menjadi sampel pada penelitian berdasarkan pendekatan-pendekatan indikator maka penulis dapat menyimpulkan bahwa hasil dari rekapitulasi keseluruhan yaitu yang menjawab pada kategori “Setuju” yaitu sebanyak 1 orang (10%), selanjutnya Masyarakat Yang Tinggal di Sekitar Pabrik Sagu memberikan jawaban pada kategori “Cukup Setuju” yaitu sebanyak 2 orang (20%), dan yang memberikan jawaban “Kurang Setuju” sebanyak 7 orang (70%).

Dari hasil rekapitulasi yang penulis dapatkan dari hasil penyebaran kuisioner pada Masyarakat Yang Tinggal di Sekitar Pabrik Sagu adalah pada kategori “Kurang Setuju”, hal ini dikarenakan bahwa mereka menilai pelaksanaan pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup belum dilakukan dengan baik atau secara maksimal. Hal ini dilihat dari masih adanya pabrik sagu yang melakukan pencemaran limbah dengan cara membuang limbah langsung kesungai tanpa melalui pengelolaan terlebih dahulu, dan hal ini sangat merugikan bagi masyarakat yang terutama mata pencahariannya di sungai dan memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan jawaban yang telah dihasilkan pada kesimpulan diatas, penulis dapat mengambil jawaban pada penelitian ini yaitu tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Yaitu “Cukup Setuju”. Pada kategori Cukup Setuju tentunya ada beberapa hal

atau faktor yang menjadi kendala yang penulis temui ketika melakukan penelitian, adapun hal atau faktor yang menjadi kendala tersebut adalah :

1. Letak pabrik yang jauh di dalam pelosok sehingga ketika dilakukan pengawasan Dinas tidak bisa datang sesuai tanggal pemeriksaan dikarenakan medan tempuh yang sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama.
2. Ada beberapa pabrik sagu yang tetap melakukan pelanggaran dengan membuang limbah secara langsung ke sungai meskipun sudah diberikan surat peringatan atau surat teguran oleh dinas.
3. Dinas tidak memiliki wewenang untuk mencabut surat izin usaha bagi pabrik sagu yang sering melakukan pelanggaran, menjadikan dinas tidak bisa memberikan sanksi pencabutan izin usaha secara langsung pada pabrik melainkan hanya bisa memberikan surat peringatan atau surat teguran saja dan melaporkan hal tersebut kepada kepala daerah atau bupati yang tentunya hal itu membutuhkan proses dan waktu yang lumayan lama.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.

Tebing Tinggi merupakan suatu Kecamatan di daerah Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau yang banyak terdapat pabrik sagunya. Adanya banyak pabrik sagu di daerah tersebut dikarenakan di daerah Tebing Tinggi mayoritas penduduknya berkebun sagu. Banyaknya pabrik sagu juga mempengaruhi lingkungan sekitar pabrik, seperti pencemaran air yang terjadi akibat pembuangan limbah secara sembarangan tanpa diolah terlebih dahulu. Karena hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan terhadap pabrik-pabrik sagu dalam pengelolaan limbahnya. Ketika melakukan pengawanan Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan sosialisasi terhadap karyawan pabrik terkait pengelolaan limbah, supaya tidak mencemari lingkungan sekitar.

Dalam proses pelaksanaan pengawasan pabrik sagu dalam mengelola limbah, masyarakat juga turut berperan serta. Karena jika ada pabrik sagu yang membuang limbah secara sembarangan masyarakat akan melapor kepada Dinas Lingkungan Hidup, dan pabrik sagu tersebut akan dikenai sanksi berupa surat peringatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan pengawasan dengan baik, meskipun sudah ada peraturan yang melarang tentang Tidak boleh membuang limbah secara

sembarangan tetapi masih saja ada pabrik sagu yang melakukan pelanggaran dengan membuang limbah sembarangan/langsung kesungai tanpa diolah terlebih dahulu. Dan Dinas Lingkungan Hidup masih menunggu keputusan dari Bupati terkait pemberian hak atau wewenang untuk mencabut surat izin usaha sagu bagi pabrik sagu yang sering melanggar peraturan dengan membuang limbah kesungai secara terus menerus tanpa di olah terlebih dahulu yang bisa mencemari lingkungan sekitar. Karena selama ini Dinas Lingkungan Hidup belum punya wewenang untuk mencabut surat izin usaha secara langsung dan hanya bisa memberi sanksi berupa surat peringatan bagi pabrik sagu yang sering melanggar peraturan tersebut.

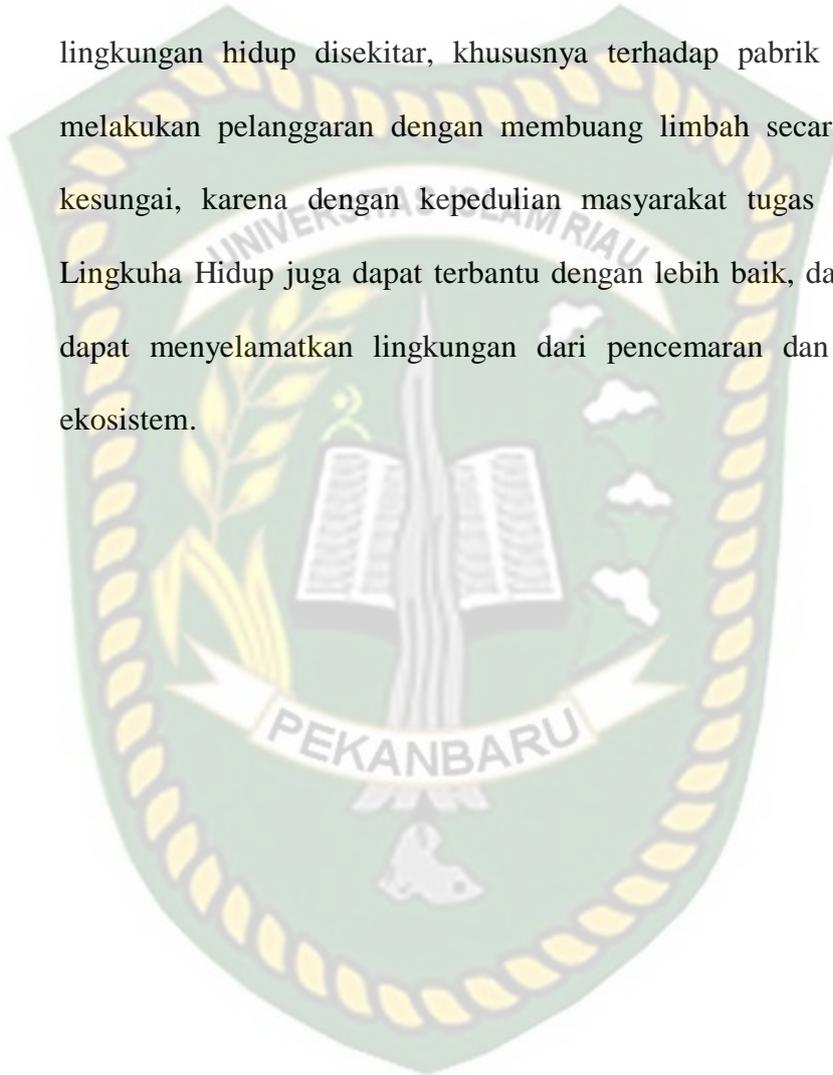
6.1 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memiliki saran yang di usulkan dalam penelitian ini, di antaranya adalah :

1. Penulis menyarankan kepada Dinas Lingkungan Hidup supaya lebih tegas lagi dalam pemberian sanksi terhadap pabrik-pabrik sagu yang sering melakukan pelanggaran terkait pembuangan limbah secara langsung kesungai tanpa di olah terlebih dahulu, agar pabrik yang melakukan pelanggaran merasa jera.
2. Penulis menyarankan kepada pihak Pabrik Sagu, supaya mempunyai kesadaran diri yang tinggi untuk tidak membuang limbah secara sembarangan kesungai tanpa di olah terlebih dahulu, karena hal

tersebut dapat mencemari, membahayakan ekosistem dan merugikan bagi lingkungan sekitar.

3. Penulis menyarankan kepada masyarakat, supaya lebih peduli kepada lingkungan hidup disekitar, khususnya terhadap pabrik sagu yang melakukan pelanggaran dengan membuang limbah secara langsung kesungai, karena dengan kepedulian masyarakat tugas dari Dinas Lingkuha Hidup juga dapat terbantu dengan lebih baik, dan kita juga dapat menyelamatkan lingkungan dari pencemaran dan kerusakan ekosistem.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU-BUKU

- Afifuddin, 2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta
- Bejo, Siswanto. 2013. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hamim, Sufian. 2003. *Administrasi, Organisasi dan Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press
- Handyaningrat Soewarno. 1990. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung
- Handoko, T. Hani. 2009. *Manajemen*. Yogyakarta. BPFE-Yogyakarta
- Hasibuan, H. Malayu. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Marnis. 2009. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: PT Panca Abdi Nurgama
- Muharam Riki Satia. 2005. *Administrasi Negara (Cacatan Kuliah)*. Yogyakarta: BPFEI
- Pasalong, Harbari. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta Press
- Riva'I, Veithzal. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dan teori praktik*. Edisi Pertama. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Robbins Stephen. 1994. *Teori Organisasi*. Jakarta: Arcan
- Siagian, Sondang. P. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Silalahi Ulbert. 2007. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Argensindo
- Syafei, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga
- Thoha, Miftah. 2011. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Pers Jakarta

- Torang, Syamsir. 2013. *Organisasi dan Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Handoko, T. Hani. 1998. *Manajemen, Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE.
- Zulkifli, dan Nurmasari. 2015. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing
- Zulkifli. 2009. *Fungsi-fungsi manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh
- Zulkifli. 2005. *Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru: UIR
- Dr. Nur Aedi. 2014. *Pengawasan Pendidikan Tinjauan Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Prof. Dr. H. Syarif, Wirman. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga

SUMBER LAIN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Peraturan Bupati Nonor 84 Tahun 2018 pasal 9 yang menjelaskan tentang Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas-tugas Pengelolaan dan Pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
5. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.